

2025



LAPORAN

**AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

**DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT**



Kunjungi Tautan Kami
www.dinkes.papuabaratprov.go.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunianya Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2025 dapat dilaksanakan dengan baik.

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Pemerintah Provinsi Papua Barat dan masyarakat) serta sebagai sarana evaluasi ke dalam atas pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat yang digunakan sebagai umpan balik bagi perbaikan kinerja pada periode berikutnya.

Pelaksanaan Tahun Anggaran 2025 merupakan Tahun kedua dari Renstra Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026, kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah sehingga masih ada sasaran yang belum tercapai, tetapi optimisme yang tinggi senantiasa tetap dimiliki untuk lebih meningkatkan kinerja pada tahun mendatang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2025 ini, disampaikan dengan harapan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dapat lebih ditingkatkan dimasa mendatang, baik melalui perbaikan pelaksanaan tugas maupun melalui penyempurnaan pelaksanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Manokwari, 16 Februari 2025

Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat,



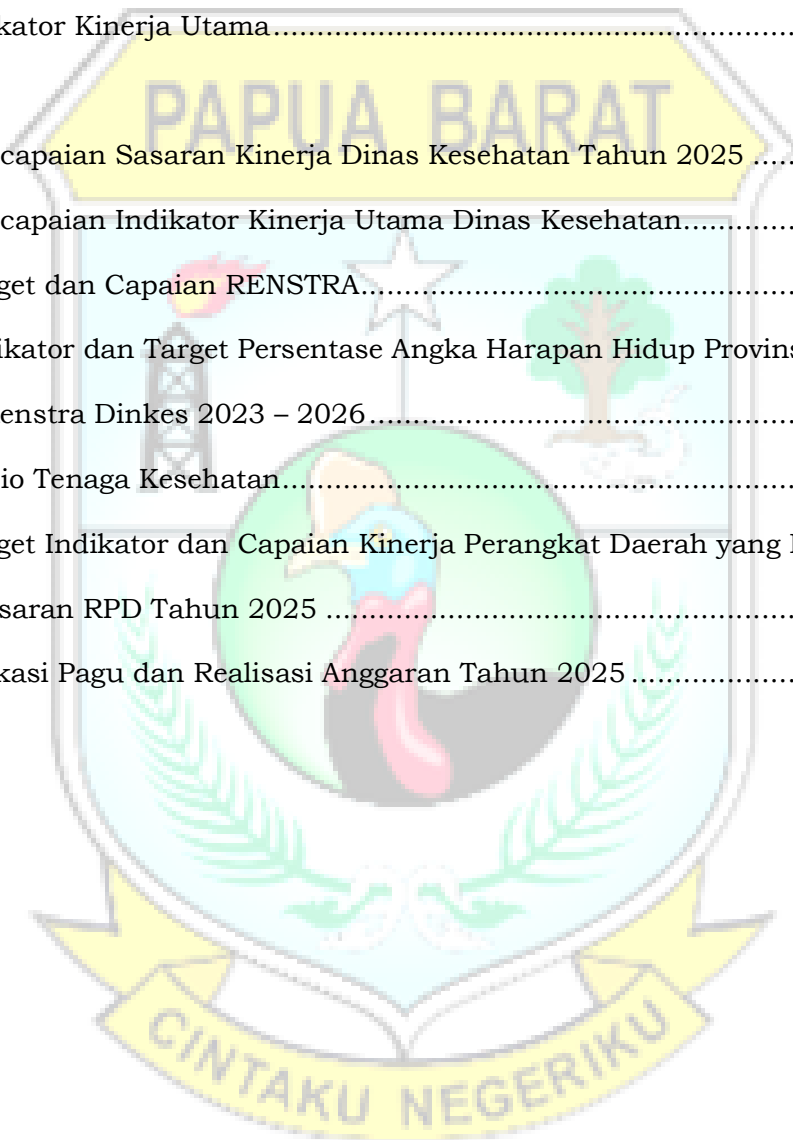
dr. ALWAN RIMOSAN, Sp.B.FINACS
Pembina Tk. I
NIP.19691027 200012 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan	2
D. Analisis Aspek Strategis	5
E. Sistematika Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN	10
A. Rencana Strategis.....	11
B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. Pengukuran Kinerja.....	21
B. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025.....	23
C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025	30
D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya	31
E. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD ...	50
F. Realisasi Anggaran	52
G. Dokumentasi Kegiatan	59
BAB IV PENUTUP.....	67
LAMPIRAN	70
A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
B. Formulir E.55 Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi Tahun 2025	
C. SK IKU 2023-2026	
D. Pohon Kinerja	
E. Cascading dan Keselarasan	
F. Crosscutting	
G. Rencana Aksi	
H. Prestasi / penghargaan yang diperoleh	

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Posisi Pegawai Per 31 Desember 2025	6
Tabel I. 2 APBD Dinas Kesehatan Menurut Jenis Belanja.....	8
Tabel II. 1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025	15
Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama.....	20
Tabel III. 1 Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025	23
Tabel III. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.....	30
Tabel III. 3 Target dan Capaian RENSTRA.....	31
Tabel III. 4 Indikator dan Target Persentase Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Berdasarkan Renstra Dinkes 2023 – 2026.....	32
Tabel III. 5 Rasio Tenaga Kesehatan.....	38
Tabel III. 6 Target Indikator dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025	50
Tabel III. 7 Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025	53



DAFTAR GRAFIK

Grafik III. 1 Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2025	32
Grafik III. 2 Angka Harapan Hidup Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2025	33
Grafik III. 3 Persentase Kecamatan minimal 1 Puskesmas Tahun 2022-2025.....	34
Grafik III. 4 Persentase Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas Tahun 2025.....	35
Grafik III. 5 Rasio Puskesmas Per Kecamatan di Indonesia Tahun 2023.....	37
Grafik III. 6 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial.....	40
Grafik III. 7 Perbandingan Pelaporan Obat Esensial di Puskesmas	41
Grafik III. 8 Persentase Kabupaten yang melaksanakan Penggerakan GERMAS/kegiatan kesehatan lainnya.....	45
Grafik III. 9 Persentase Kabupaten yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).....	45
Grafik III. 10 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Prevalensi Stunting pada Balita Tahun 2024-2025.....	47
Grafik III. 11 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Prevalensi Wasting pada Balita Tahun 2024-2025.....	49

DAFTAR GAMBAR

Gambar III. 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	59
Gambar III. 2 Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat.....	60
Gambar III. 3 Pengelolaan Pelayanan Penyakit Malaria.....	61
Gambar III. 4 Pengelolaan Pelayanan Penyakit HIV AIDS.....	62
Gambar III. 5 Pengelolaan Pelayanan Penyakit TBC.....	63
Gambar III. 6 Pengelolaan Pelayanan Imunisasi.....	64
Gambar III. 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bergerak.....	65
Gambar III. 8 Pembinaan dan Pengawasan Perizinan PBF dan PAK.....	66
Gambar III. 9 Pembangunan Gedung KJSU Tahap III	67





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan Kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/ target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Undang – undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menyatakan Akuntabilitas sebagai salah satu asas umum dalam penyelenggaraan negara. Akuntabilitas adalah salah satu tonggak penting era reformasi. Asas akuntabilitas ini menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja berisi gambaran perwujudan akuntabilitas kinerja kementerian, lembaga, pemerintahan diberbagai tingkatan dan institusi yang menggunakan serta mengelola sumber daya negara, yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga. Penyusunan Laporan kinerja OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat berpedoman pada peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat merupakan tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan program, kebijakan dan pengembangan kesehatan masyarakat, sehingga menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak – pihak yang berkepentingan serta dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi suatu lembaga.

B. Landasan Hukum

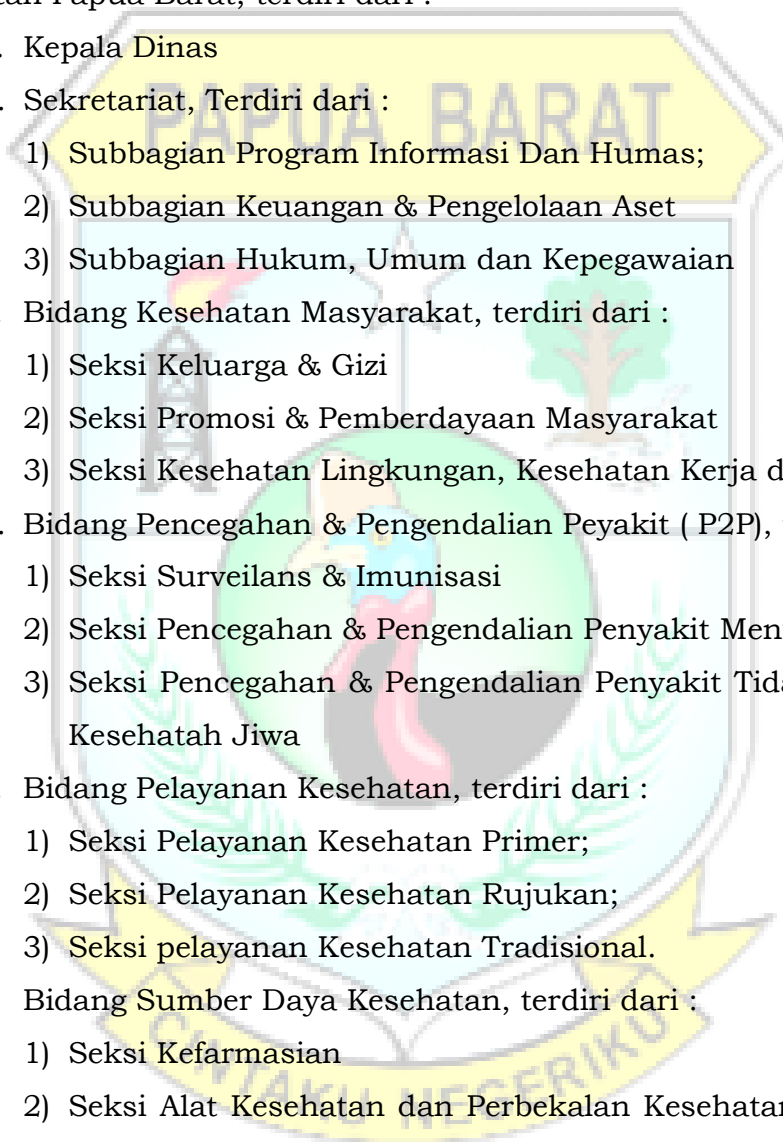
1. Undang – undang No 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang – undang no 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang- undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang –undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang –undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Meneteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia No 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Pembentukan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua Barat, yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018, tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan lembaga teknis

daerah yang merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.

Struktur Dinas Kesehatan Papua Barat berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Papua Barat, terdiri dari :

- 
- a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, Terdiri dari :
 - 1) Subbagian Program Informasi Dan Humas;
 - 2) Subbagian Keuangan & Pengelolaan Aset
 - 3) Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, terdiri dari :
 - 1) Seksi Keluarga & Gizi
 - 2) Seksi Promosi & Pemberdayaan Masyarakat
 - 3) Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
 - d. Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit (P2P), terdiri dari :
 - 1) Seksi Surveilans & Imunisasi
 - 2) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
 - 3) Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular & Kesehatan Jiwa
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 - 2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;
 - 3) Seksi pelayanan Kesehatan Tradisional.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kefarmasian
 - 2) Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Alat Rumah Tangga
 - 3) Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis daerah Instalasi Farmasi pada Dinas Kesehatan Provinsi Papua

Barat telah dibentuk UPTD-IFP yang dipimpin oleh seorang Kepala UPTD-IFP yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD-IFP menyelenggarakan fungsi :

- 1) perencanaan, penerimaan, penyimpanan, pemantauan dan evaluasi Sediaan Farmasi , BMHP dan perbekalan kesehatan yang diperlukan oleh pelayanan kesehatan;
- 2) pengelolaan dan pendistribusian Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 3) penyusunan analisis kebutuhan, pencatatan dan pelaporan persediaan dan Mutasi Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 4) pengamatan mutu/kualitas Persediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan secara umum baik yang ada dalam persediaan maupun yang akan didistribusikan;
- 5) monitoring dan evaluasi penggunaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan serta melakukan pembinaan pada unit pelayanan kesehatan;
- 6) penyusunan standar dan prosedur pengelolaan Sediaan Farmasi, BMHP dan perbekalan kesehatan;
- 7) pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- 8) pelaporan pelaksanaan tugas dan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala UPTD-IFP dibantu oleh:

- 1) Subbagian Tata Usaha;
- 2) Seksi Analisis, Penerimaan, Distribusi dan Pengamanan;
- 3) Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan dan Penyiapan; dan
- 4) Kelompok Jabatan Fungsional.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan teknis umum pemerintah daerah serta

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat mempunyai fungsi :

- 1) Membantu pengelolaan pembangunan kesehatan yang lebih baik dan keberlanjutan;
- 2) Menghasilkan rencana dan pembangunan kesehatan yang terarah kepada memenuhi hak masyarakat;
- 3) Memecahkan isu-isu strategis kesehatan, mendorong terwujudnya komitmen, kesepakatan dan kerja sama antara instansi masing-masing dan dengan masyarakat;
- 4) Mengkomunikasikan dan memasarkan eksistensi kesehatan (peningkatkan kesadaran);
- 5) Penyediaan pelayanan kesehatan lebih baik berdasarkan data yang akurat dan upaya untuk meningkatkan kapasitas penyampaian pelayanan;
- 6) Pengelolaan keuangan lebih baik, terbuka dan akuntabel.

D. Analisis Aspek Strategis

Aspek Strategis adalah Aspek yang mendukung dan merupakan sumberdaya dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan menuju perwujudan visi dan misi Dinas Kesehatan Papua Barat, Aspek – aspek tersebut antara lain:

1. Aspek Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 sebanyak 82 Orang, berkurang dibanding dengan tahun 2024 (Sebanyak 86 Orang), sebagaimana dapat dilihat dari Tabel berikut :

Tabel I. 1 Posisi Pegawai Per 31 Desember 2025 menurut Golongan dan Jabatan

NO	URAIAN	PER 31 DESEMBER 2024	MUTASI		PER 31 DESEMBER 2025	
			(+)	(-)	DINAS	RSUD
1	2	3	4	5	6	7
A	STRUKTURAL					
1	Eselon II	1	0	0	1	
2	Eselon III	6	0	0	6	
3	Eselon IV	18	0	0	18	
	<i>Sub Jumlah</i>	25	0	0	25	
B	FUNGSIONAL	0	2	0	2	
C	STAF	54	0	6	48	
D	PPPK	7	0	0	7	
	JUMLAH	86	2	6	82	
	TOTAL	86	2	6	82	

Sumber : Sub. Bagian Hukum, Umum, dan Kepegawaian, Dinkes Papua Barat

2. Aspek Sarana Pelayanan Kesehatan

Dinas Kesehatan Papua Barat memiliki sarana/ Prasarana yang diperlukan untuk mendukung kegiatan Operasional Dinas Kesehatan, sarana dan prasaran tersebut berupa Gedung, Gudang, Mobil (Mobil Operasional Ambulance). Kegiatan Operasional Dinas kesehatan Papua Barat dilaksanakan di :

- 1) Kantor Utama/ Gedung Induk terletak di Kompleks Perkantoran Gubernur Papua Barat, Jalan Brigjen (Purn) Abraham O. Ataruri, Arfai, Manokwari.
- 2) UPTD - IFP terletak di Jalan Brigjen Abraham O. Ataruri, Arfai, Manokwari.
- 3) RSUD Provinsi Papua Barat terletak di Kompleks Irman Jaya, Jalan Angkasa Mulyono, Amban, manokwari.

Sarana Penunjang Kegiatan Pelayanan yang dimiliki Oleh Dinas Kesehatan Papua Barat antara lain :

- 1) 4 Buah Ambulance;
- 2) 17 Unit Mobil Dinas/ Operasional
- 3) 32 Unit Motor/ Kendaraan Operasional
- 4) 63 Unit Laptop
- 5) 37 Unit Personal Computer/ PC
- 6) 2 Unit kendaraan Roda tiga VIAR

3. Aspek Pembiayaan Kesehatan.

Berdasarkan penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat, sesuai Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Tahun 2025. Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memperoleh alokasi dana sebesar Rp. 188.428.917.311,58 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Lima Puluh Delapan Rupiah) naik dari Anggaran Tahun 2024 yang sebesar Rp. 102.292.006.267,00 (Seratus Dua Miliar Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Enam Ribu Dua Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah). Dengan dana tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan kegiatan lainnya sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Program/kegiatan yang telah direncanakan memerlukan koordinasi antara bidang/bagian yang memadai sehingga pencapaian sasaran program atau kegiatan yang bersangkutan dapat lebih efektif.

Tabel I. 2 APBD Dinas Kesehatan Menurut Jenis Belanja

No	URAIAN	APBD Dinas Kesehatan		
		Th. 2023	Th. 2024	Th. 2025
1	Anggaran	199.985.977.762,00	102.292.006.267,00	188.428.917.311,58
2	Belanja Tidak Langsung	18.735.372.733,00	36.929.926.048,00	65.999.667.000,00
	2.1 Belanja Pegawai	18.735.372.733,00	36.929.926.048,00	65.999.667.000,00
3	Belanja Langsung	181.250.605.029,00	65.362.080.219,00	122.429.250.311,58
	3.1 Belanja Pegawai	1.640.558.920,00	-	-
	3.2 Belanja Barang dan Jasa	75.882.539.674,00	44.718.777.946,00	103.355.825.242,08
	3.3 Belanja Modal	95.477.506.435,00	19.643.302.273,00	17.073.425.069,50
	3.5 Belanja Hibah	8.250.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00

Sumber : SIPD RI

4. Aspek Permasalahan Kesehatan

Prioritas Masalah Kesehatan di Provinsi Papua Barat pada Tahun 2025 di Prioritaskan pada Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

- 1 Angka Harapan Hidup
- 2 Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas
- 3 Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk
- 4 Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%
- 5 Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- 6 Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita
- 7 Persentase Balita Gizi Buruk

E. Sistematika Laporan

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dengan susunan sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Landasan Hukum
- C. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan
- D. Analisis Aspek Strategis
- E. Sistematika Laporan

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

- A. Rencana Strategis
- B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Capaian Sasaran Kinerja
- C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
- D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian IKU Tahun 2025
- E. Analisis Realisasi Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya
- F. Realisasi Anggaran
- G. Dokumentasi Kegiatan

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN –LAMPIRAN

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- B. Formulir E.55 Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi Tahun 2025
- C. SK IKU 2023 - 2026
- D. Pohon Kinerja
- E. Cascading dan Keselarasan
- F. Crosscutting
- G. Rencana Aksi
- H. Prestasi / penghargaan yang diperoleh



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

BAB II

PERENCANAAN

BAB II

PERENCANAAN

Sebagai sebuah institusi pelayanan publik mempunyai rencana strategis. Tahun 2025 merupakan periode yang sangat strategis bagi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat karena berada pada fase transisi dari dokumen perencanaan lama menuju dokumen perencanaan baru. Secara khusus, tahun 2025 merupakan Tahun peralihan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah 2023–2026 menuju pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah 2025–2029 yang baru. Kondisi transisi ini berimplikasi pada penyesuaian arah kebijakan, sasaran, indikator kinerja, serta struktur program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kesehatan. Perencanaan kinerja Tahun 2025 karenanya disusun dengan pendekatan “bridging” (penjembatanan) yang tetap menjaga kesinambungan (continuity) pencapaian sasaran kesehatan jangka menengah sebelumnya, sekaligus mulai mengintegrasikan prioritas dan target yang ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra baru.

Dalam konteks tersebut, perencanaan kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2025 berfungsi sebagai instrumen sinkronisasi antara target akhir periode RPD/Renstra 2023–2026 dengan baseline awal RPJMD/Renstra 2025–2029; sarana penyesuaian nomenklatur program dan indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah ke dalam kerangka baru yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Landasan pengukuran kinerja yang tetap konsisten dan akuntabel, meskipun terjadi perubahan atau transisi dokumen perencanaan.

Rencana Strategis adalah suatu alat manajemen, yang merupakan proses berkelanjutan dan sistimatis dari pembuatan keputusan yang berisiko, dengan manfaat sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipasi dan mengorganisasikan secara sistematik untuk usaha-usahanya melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasil melalui umpan balik.

Rencana strategis instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan pengembangan lingkungan strategis baik lokal maupun nasional. Analisis terhadap lingkup organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam perhitungan kekuatan (*strenght*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan tantangan / kendala (*threats*) yang ada.

Dari uraian singkat diatas, unsur – unsur utama yang perlu secara formal di definisikan dalam suatu rencana Strategis adalah Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis serta perumusan Strategis pencapaian tujuan atau sasaran berupa Program dan Kegiatan.

A. Rencana Strategis

Tujuan dan Sasaran

Tujuan jangka menengah dari Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat merupakan pernyataan tentang sesuatu kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Pada periode 2023-2026. Tujuan dirumuskan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026, yang menggambarkan fungsi pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat. Sesuai dengan tujuan Rencana Pembangunan Daerah Papua Barat “Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia unggul berkarakter dan kontekstual Papua Barat serta perlindungan sosial” maka dirumuskan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Sasaran yang terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan periode tahun 2023-2026.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menetapkan 3 (tiga) tujuan yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Meningkatkan Kapasitas Dan Akuntabilitas Pemerintahan Serta Koordinasi Kebijakan Daerah;

2. Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
3. Menurunkan Angka Stunting.

Untuk mencapai tujuan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, maka dirumuskan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah;
2. Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Layanan Kesehatan yang merata;
3. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan secara merata;
4. Meningkatkan Akses Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan;
5. Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat;
6. Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gisi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin.

Pada Renstra 2025 -2029, Tujuan Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sebagai berikut: “Meningkatkan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan, Menurunkan Angka Prevalensi Stunting dan Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi OAP “.

Tujuan rencana strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat memiliki 9 (sembilan) sasaran strategis, Dimana enam diantaranya merupakan sasaran strategis pada Renstra periode sebelumnya, yang di rinci lebih detail menjadi :

Sasaran 1 (S.1) : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah

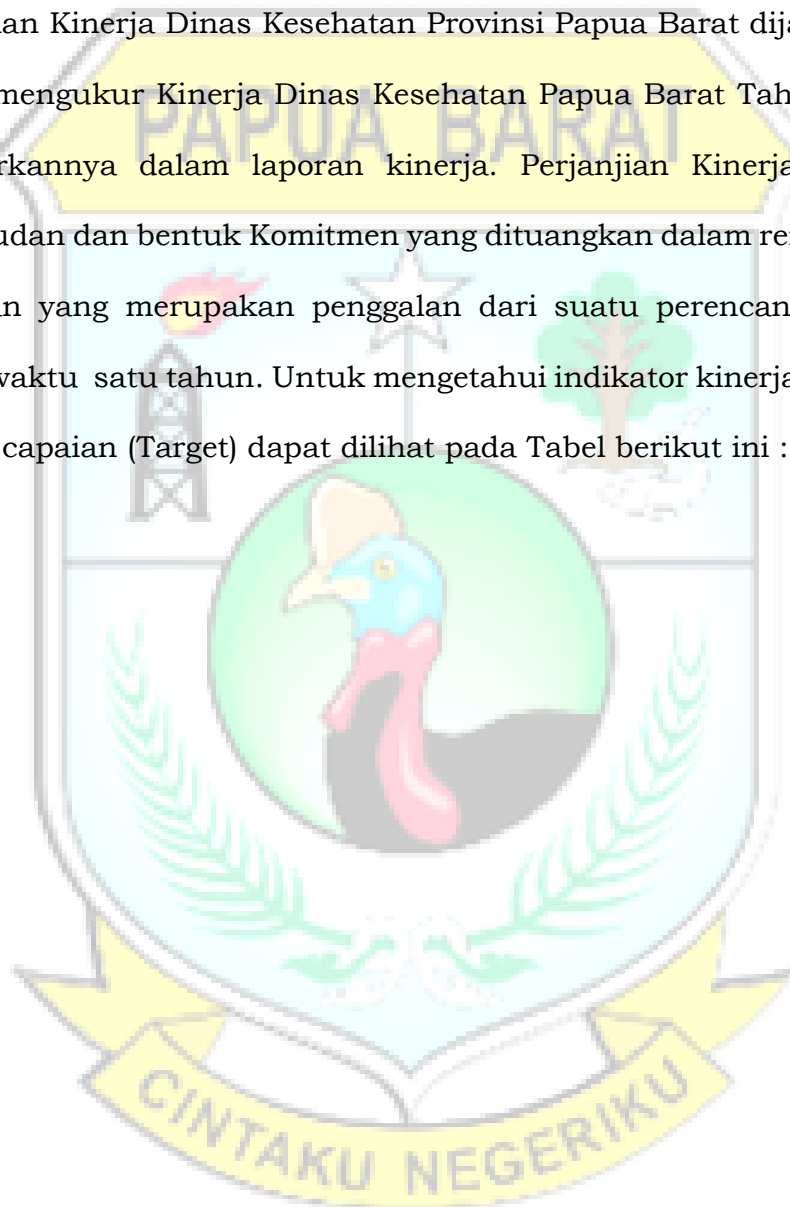
- Sasaran 2 (S.2) : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata
- Sasaran 3 (S.3) : Menurunkan Angka Kesakitan Malaria
- Sasaran 4 (S.4) : Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata
- Sasaran 5 (S.5) : Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Mutu
- Sasaran 6 (S.6) : Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat
- Sasaran 7 (S.7) : Meningkatnya Akreditasi pelayanan Kesehatan
- Sasaran 8 (S.8) : Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin
- Sasaran 9 (S.9) : Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata bagi OAP

B. Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama

1. Perjanjian Kinerja

Untuk mengukur capaian setiap sasaran Strategis maka telah ditetapkan 6 (Enam) Sasaran Strategis yang telah ditetapkan pada RENSTRA perubahan Dinas Kesehatan 2023-2026, yang juga menjadi bagian dari Renstra Dinas Kesehatan 2025-2029. Rumusan tersebut juga telah tertuang didalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Berdasarkan APBD Perubahan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan Papua Barat mendapatkan Anggaran Belanja sebesar

Rp. 188.428.917.311,58 (Seratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Lima Puluh Delapan Rupiah) dengan 5 Program, 19 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dijadikan acuan untuk mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 dan melaporkannya dalam laporan kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan perwujudan dan bentuk Komitmen yang dituangkan dalam rencana kinerja Tahunan yang merupakan penggalan dari suatu perencanaan strategis dalam waktu satu tahun. Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (Target) dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel II. 1 Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Lakip	B	Triwulan : Triwulan : Triwulan : Triwulan : 100	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.379.335.661	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi	Rp 133.934.660	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1	
							1,1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 98.934.660				
							1,2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 35.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 66.034.667.000					
							1,1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 65.999.667.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 105	105
							1,2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 35.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							Administrasi Kepegawaian Perangkat	Rp 200.000.000					
							1,2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 200.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 854.855.450					
							1,1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1,2	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 72.038.450	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1,3	penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Rp 161.982.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 2	2
							1,4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 54.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 135.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1,6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 411.835.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 760.000.000					
							1,1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 760.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp 2.287.713.551					
							1,1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 657.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1,2	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Rp 1.630.713.551	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1

NO	SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp 108.165.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	Triwulan 1	3
							1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 78.165.000			Triwulan 2	
							1.2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 30.000.000			Triwulan 3	
											Triwulan 4	
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	%	Triwulan : Triwulan : Triwulan : 100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 50.130.613.988	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 23.315.930.524	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	Triwulan 1	1
							1.1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 400.000.000			Triwulan 2	
							1.2 Pengembangan Rumah Sakit	Rp 10.444.708.084			Triwulan 3	
							1.3 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	Rp 492.675.914			Triwulan 4	
							1.4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 2.202.100.000			Triwulan 1	
							1.5 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 292.082.846			Triwulan 2	
							1.6 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 5.471.187.507			Triwulan 3	
							1.7 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 2.320.000.000			Triwulan 4	
							1.8 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medik Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 1.693.176.173			Triwulan 1	
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 24.188.192.857			Triwulan 2	
							1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Rp 2.827.630.928			Triwulan 3	
							1.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 1.396.500.000			Triwulan 4	
							1.3 pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Rp 440.838.000			Triwulan 1	
											Triwulan 2	
											Triwulan 3	
											Triwulan 4	

NO	SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
							1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 636.810.425	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp 381.911.808	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 2.235.895.058	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp 125.840.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 154.593.982	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.13	pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Rp 8.757.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 870.217.375	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.16	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 659.157.612	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.17	Pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan	Rp 3.852.073.320	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.18	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.19	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 232.940.741	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.20	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Rp 160.261.709	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.21	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rp 277.047.000	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.22	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Rp 802.950.898	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1

NO	SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
							Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 313.469.806				
							1.1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 313.469.806	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	Rp 1.440.520.739				
							1.1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Rp 826.711.598	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 2	2
							1.2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 613.809.141	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 2	2
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 872.500.061				
							1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Rp 279.254.147	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Rp 345.244.565	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Rp 248.001.350	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	%	Triwulan : Triwulan : Triwulan : Triwulan : 100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 63.886.225.679	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2.543.410.720				
							1.1 peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia kesehatan	Rp 2.054.075.356	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 30	30
							1.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 489.335.364	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 4.992.414.959				
							1.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Rp 4.992.414.959	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 23	23
							Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua	Rp 56.350.400.000				
							1.1 Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Rp 56.350.400.000	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 14000	14000
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%		Triwulan : Triwulan : Triwulan : Triwulan : 100	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 276.511.438	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 213.829.189				
							1.1 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang PAK	Rp 213.829.189	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 3	3
							Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 62.682.249				
							1.1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 62.682.249	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1

NO	SASARAN STRATEGI OPD SESUAI RENSTRA	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	PROGRAM	PAGU ANGGARAN	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TRIWULAN	TARGET
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	%	Triwulan : Triwulan : Triwulan : 100	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp 783.288.628	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 293.430.557	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas pemberdayaan masyarakat	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp 489.858.071				
							1.1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 489.858.071	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Persentase Balita Gizi Buruk	%	Triwulan : Triwulan : Triwulan : 100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 2.972.941.918	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2.972.941.918	meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	Dokumen	Triwulan 1 : Triwulan 2 : Triwulan 3 : Triwulan 4 : 1	1
							1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2.972.941.918				



2. Indikator Kinerja Utama

Adalah Untuk mengukur capaian Indikator Pada Renstra Papua Barat 2023-2026, dan bagian dalam periode transmisi Renstra 2025-2029 untuk memudahkan disusunlah Indikator Kinerja Utama (IKU) sebanyak 7 Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Bidang Kesehatan, seperti di tuangkan pada tabel berikut ini :

Tabel II. 2 Indikator Kinerja Utama

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
				2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.78	66.04	66.31	66.57	66.84	66.84
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Persen	75.00%	75.50%	83.11%	91.32%	100%	100%
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Per 1000 Penduduk	10.45 per 1000 penduduk	10.50 per 1000 penduduk	10.55 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	Persen	78.33%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	42.85%	46.15%	61.54%	79.92%	100%	100%
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	30%	26%	22%	18%	14%	14%
7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	10.05%	8.5%	7.5%	7.2%	6.9%	6.9%



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS

KINERJA

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat menggunakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai misi organisasi. Pelaporan akuntabilitas kinerja ini dituangkan melalui evaluasi dan analisis kinerja atas seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Evaluasi kinerja bertujuan agar pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dapat diketahui sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang.

Sedangkan analisis kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa yang akan datang. Analisis dilaksanakan terhadap perbedaan kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi, serta penyebab untuk mencari strategi pemecahan masalah yang akan dilaksanakan. Analisis akuntabilitas kinerja meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan dan misi serta visi sebagaimana ditetapkan dalam perencanaan strategis.

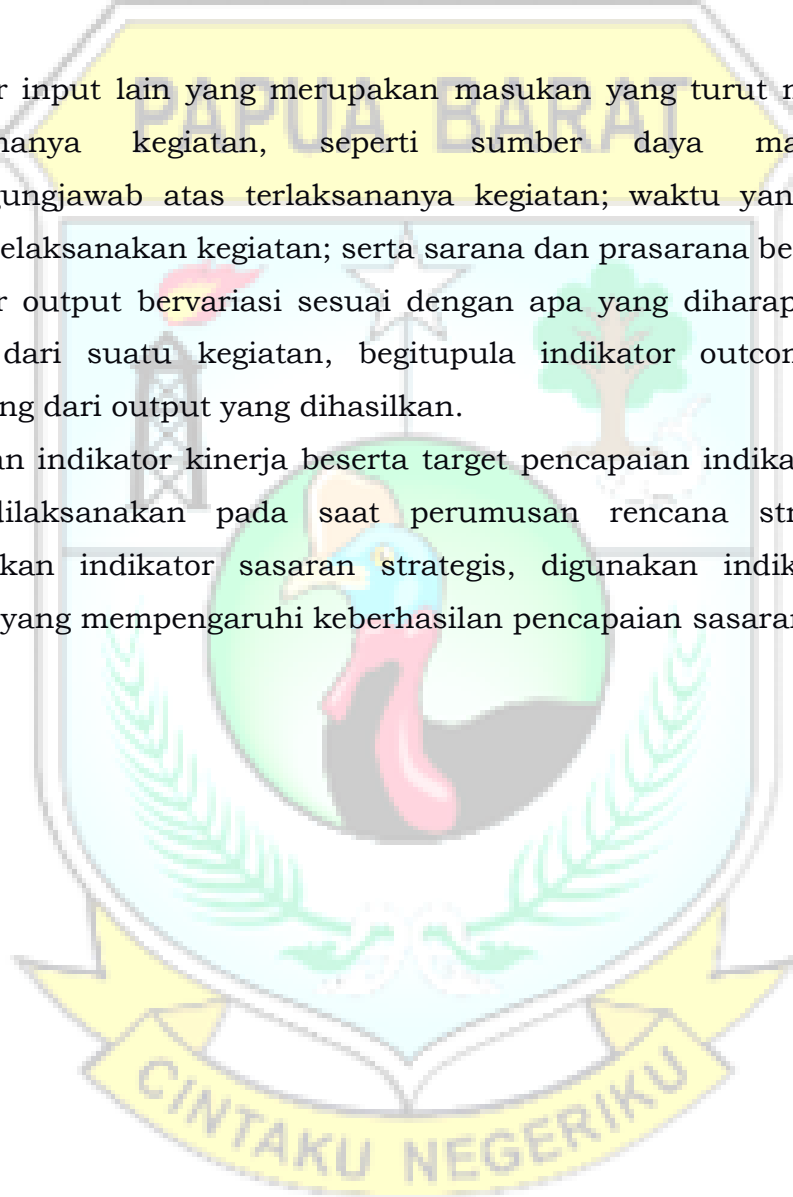
A. Pengukuran Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan saran dan tujuan yang telah ditetapkan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai dengan rencana strategi dalam **Penetapan Indikator Kinerja**. Indikator kinerja yang

digunakan dalam mengukur Kinerja Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat meliputi input, output dan outcome. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp.xxx).

Indikator input lain yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggungjawab atas terlaksananya kegiatan; waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan; serta sarana dan prasarana belum memadai. Indikator output bervariasi sesuai dengan apa yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, begitupula indikator outcome, bervariasi tergantung dari output yang dihasilkan.

Penetapan indikator kinerja beserta target pencapaian indikator kinerja ini mulai dilaksanakan pada saat perumusan rencana strategi. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.



B. Capaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

Berikut ini merupakan gambaran umum pencapaian sasaran kinerja organisasi pada Dinas Kesehatan Papua Barat tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel III. 1 Pencapaian Sasaran Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Lakip	Rp 70.379.335.661				Rp 70.379.335.661			Rp 50.747.084.245	
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 133.934.660				Rp 133.934.660			Rp 127.605.948	
		1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 98.934.660	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp 98.934.659,50	1	Dokumen	Rp 93.325.948	100,00%
		1,2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 35.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Laporan	Rp 35.000.000	1	Laporan	Rp 34.280.000	100,00%
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 66.034.667.000				Rp 66.034.667.000			Rp 46.467.842.106	
		1,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 65.999.667.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	Orang/Bulan	Rp 65.999.667.000	105	Orang/Bulan	Rp 46.432.842.106	100,00%
		1,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 35.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	Rp 35.000.000	1	Laporan	Rp 35.000.000	100,00%
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 200.000.000				Rp 200.000.000			Rp 195.300.000	
		1,2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 200.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Rp 200.000.000	1	Dokumen	Rp 195.300.000	100,00%
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 854.855.450				Rp 854.855.450			Rp 841.554.659	
		1,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 20.000.000	1	Paket	Rp 20.000.000	100,00%
		1,2 Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 72.038.450	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp 72.038.450	1	Paket	Rp 68.117.000	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
						K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		1,3	penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Rp 161.982.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 161.982.000	1	Paket	Rp 161.769.000	100,00%
		1,4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 54.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Rp 54.000.000	1	Dokumen	Rp 54.000.000	100,00%
		1,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 135.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 135.000.000	1	Laporan	Rp 134.954.660	100,00%
		1,6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 411.835.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Rp 411.835.000	1	Laporan	Rp 402.713.999	100,00%
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 760.000.000				Rp 760.000.000			Rp 747.000.000	
		1,1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 760.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	Rp 760.000.000	1	Unit	Rp 747.000.000	100,00%
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.287.713.551				Rp 2.287.713.551			Rp 2.259.704.228	
		1,1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 657.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 657.000.000	1	Laporan	Rp 655.158.033	100,00%
		1,2	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Rp 1.630.713.551	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 1.630.713.551	1	Laporan	Rp 1.604.546.195	100,00%
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 108.165.000				Rp 108.165.000			Rp 108.077.304	
		1,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 78.165.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	Rp 78.165.000	3	Unit	Rp 78.150.304	100,00%
		1,2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	Unit	Rp 30.000.000	34	Unit	Rp 29.927.000	100,00%
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas		Rp 50.130.613.988				Rp 50.130.613.988			Rp 41.169.649.749	
		1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 23.315.930.524				Rp 23.315.930.524			Rp 20.931.824.519	
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 400.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	Rp 400.000.000	1	Unit	Rp 397.992.000	100,00%
		1,1	Pengembangan Rumah Sakit	Rp 10.444.708.084	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	Rp 10.444.708.084	1	Unit	Rp 10.644.541.976	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		1,2 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Rp 492.675.914	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	3	Layanan	Rp 492.675.914	3	Layanan	Rp 399.331.597	100,00%
		1,3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 2.202.100.000	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Unit	Rp 2.202.100.000	1	Unit	Rp 1.168.182.000	100,00%
		1,4 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 292.082.846	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui	2	Unit	Rp 292.082.846	2	Unit	Rp 250.905.307	100,00%
		1,5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 5.471.187.507	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	7	Unit	Rp 5.471.187.507	7	Unit	Rp 4.936.487.468	100,00%
		1,6 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 2.320.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	Paket	Rp 2.320.000.000	1	Paket	Rp 1.444.792.671	100,00%
		1,7 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 1.693.176.173	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1	Dokumen	Rp 1.693.176.173	1	Dokumen	Rp 1.689.591.500	100,00%
		2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 24.188.192.857				Rp 24.188.192.857			Rp 18.048.939.003	
		1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Rp 2.827.630.928	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1100	Orang	Rp 2.827.630.928	1100	Orang	Rp 656.272.750	100,00%
		1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 1.396.500.000	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	Orang	Rp 1.396.500.000	1100	Orang	Rp 45.297.780	110,00%
		1,3 pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Rp 440.838.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	Rp 440.838.000	1	Dokumen	Rp 431.502.234	100,00%
		1,4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	Rp 75.328.000	1	Dokumen	Rp 73.070.000	100,00%
		1,5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	Rp 75.328.000	1	Dokumen	Rp 75.028.000	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		1,6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	Rp 150.000.000	1	Dokumen	Rp 149.046.436	100,00%
		1,7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 636.810.425	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	Rp 636.810.425	1	Dokumen	Rp 217.076.000	100,00%
		1,9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp 381.911.808	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	Rp 381.911.808	1	Dokumen	Rp 315.616.150	100,00%
		1,10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 2.235.895.058	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	Dokumen	Rp 2.235.895.058	1	Dokumen	Rp 1.505.293.580	100,00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp 125.840.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dokumen	Rp 125.840.000	1	Dokumen	Rp 51.367.914	100,00%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 154.593.982	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	Rp 154.593.982	1	Dokumen	Rp 127.264.986	100,00%
		1,11 pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Rp 8.757.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	Rp 8.757.540.000	1	Dokumen	Rp 8.632.734.650	100,00%
		1,12 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 870.217.375	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	Rp 870.217.375	1	Dokumen	Rp 236.008.726	100,00%
		1,13 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 659.157.612	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 659.157.612	1	Dokumen	Rp 565.972.326	100,00%
		1,14 Pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan	Rp 3.852.073.320	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp 3.852.073.320	1	Dokumen	Rp 3.721.963.183	100,00%
		1,16 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 75.328.000	1	Dokumen	Rp 74.982.050	100,00%
		1,17 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 232.940.741	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp 232.940.741	1	Unit	Rp 200.212.427	100,00%
		1,18 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Rp 160.261.709	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp 160.261.709	1	Dokumen	Rp 41.760.000	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		1,19 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rp 277.047.000	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	Rp 277.047.000	1	Paket	Rp 128.888.401	100,00%
		1,20 Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Rp 802.950.898	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	Rp 802.950.898	1	Dokumen	Rp 799.581.410	100,00%
		3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 313.469.806				Rp 313.469.806			Rp 290.928.856	
		1,1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 313.469.806	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 313.469.806	1	Dokumen	Rp 290.928.856	100,00%
		4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 1.440.520.739				Rp 1.440.520.739			Rp 1.136.937.361	
		1,1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Rp 826.711.598	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2	Unit	Rp 826.711.598	2	Unit	Rp 677.513.955	100,00%
		1,2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 613.809.141	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2	Unit	Rp 613.809.141	2	Unit	Rp 459.423.406	100,00%
		5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 872.500.061				Rp 872.500.061			Rp 761.020.010	
		1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Rp 279.254.147	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 279.254.147	1	Dokumen	Rp 244.042.502	100,00%
		1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Rp 345.244.565	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 345.244.565	1	Dokumen	Rp 320.613.366	100,00%
		1,3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Rp 248.001.350	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 248.001.350	1	Dokumen	Rp 196.364.142	100,00%
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Rp 63.886.225.679				Rp 63.886.225.679			Rp 13.400.577.930	
		1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2.543.410.720				Rp 2.543.410.720			Rp 1.983.176.168	
		1,1 peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	Rp 2.054.075.356	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	30	Orang	Rp 2.054.075.356	30	Orang	Rp 1.621.448.968	100,00%
		1,2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 489.335.364	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	Rp 489.335.364	1	Dokumen	Rp 361.727.200	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 4.992.414.959				Rp 4.992.414.959			Rp 3.417.331.562	
		1,1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Rp 4.992.414.959	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	23	Orang	Rp 4.992.414.959	23	Orang	Rp 3.417.331.562	100,00%
		3 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Rp 56.350.400.000				Rp 56.350.400.000			Rp 8.000.070.200	
		1,1 Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Rp 56.350.400.000	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	14000	Orang	Rp 56.350.400.000	17315	Orang	Rp 8.000.070.200	123,68%
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	Rp 276.511.438				Rp 276.511.438			Rp 274.644.363	
		1 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 213.829.189				Rp 213.829.189			Rp 213.020.363	
		1,1 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang PAK	Rp 213.829.189	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Perizinan	3	Sarana	Rp 213.829.189	3	Sarana	Rp 213.020.363	100,00%
		2 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Rp 62.682.249				Rp 62.682.249			Rp 61.624.000	
		1,1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 62.682.249	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1	Sarana	Rp 62.682.249	1	Sarana	Rp 61.624.000	100,00%
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Rp 783.288.628				Rp 783.288.628			Rp 780.536.314	
		1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 293.430.557				Rp 293.430.557			Rp 293.029.154	
		1,1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Provinsi	Rp 293.430.557	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas pemberdayaan masyarakat	1	Dokumen	Rp 293.430.557	1	Dokumen	Rp 293.029.154	100,00%
		3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp 489.858.071				Rp 489.858.071			Rp 487.507.160	
		1,1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 489.858.071	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	Rp 489.858.071	1	Dokumen	Rp 487.507.160	100,00%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPd PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan	Persentase Balita Gizi Buruk	Rp 2.972.941.918				Rp 2.972.941.918			Rp 2.864.209.864	
		1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	Rp 2.972.941.918				Rp 2.972.941.918			Rp 2.864.209.864	
		1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2.972.941.918	meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	1	Dokumen	Rp 2.972.941.918	1	Dokumen	Rp 2.864.209.864	100,00%



C. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Tahun 2025

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan Peraturan MENPAN dan RB no : PER/ 09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Keluaran (Output) dan hasil (Outcome).

Tujuan dalam penetapan IKU adalah untuk :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akutabilitas kinerja.

Pengukuran kinerja Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 menggunakan metode yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja.

Tabel III. 2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Target Capaian Setiap Tahun	
		2025	
		Target	Realisasi
1	2	3	4
1	Angka Harapan Hidup	66,57 Tahun	68,76 Tahun
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	91,32%	81,40%
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	10,1 per 1000 penduduk
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	100%	65,00%
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	79,92%	57,14%
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	18%	14,20%
7	Persentase Balita Gizi Buruk	7,20%	9,60%

D. Analisis Target dan Realisasi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan target dan capaian indikator Periode Tahun sebelumnya terdapat kenaikan capaian indikator kinerja utama dari Tahun 2023 yakni pada indikator Angka Harapan Hidup, sementara indikator Persentase Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas dan Persentase Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat mengalami kenaikan namun masih dibawah target yang ditetapkan. Ada pula indikator yang mengalami penurunan capaian, yakni pada indikator Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100% dan Persentase Balita Gizi Buruk, seperti ditampilkan pada Tabel berikut :

Tabel III. 3 Target dan Capaian RENSTRA

No.	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun					
			2023		2024		2025	
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Angka Harapan Hidup	65,78 Tahun	66,04 Tahun	68,51 Tahun	66,31 Tahun	68,47 Tahun	66,57 Tahun	68,76 Tahun
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	75,00%	75,50%	75,58%	83,11%	79,00%	91,32%	81,40%
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	10.45 per 1000 penduduk	10.50 per 1000 penduduk	10.61 per 1000 penduduk	10.55 per 1000 penduduk	10.82 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	10,1 per 1000 penduduk
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	78,33%	100%	84,21%	100%	70,83%	100%	65,00%
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	42,85%	46,15%	42,85%	61,54%	42,85%	79,92%	57,14%
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	30%	26%	13,67%	22%	14,30%	18%	14,20%
7	Persentase Balita Gizi Buruk	10,05%	8,50%	8,83%	7,50%	10,10%	7,20%	9,60%

1. Angka Harapan Hidup

Grafik III. 1 Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2025

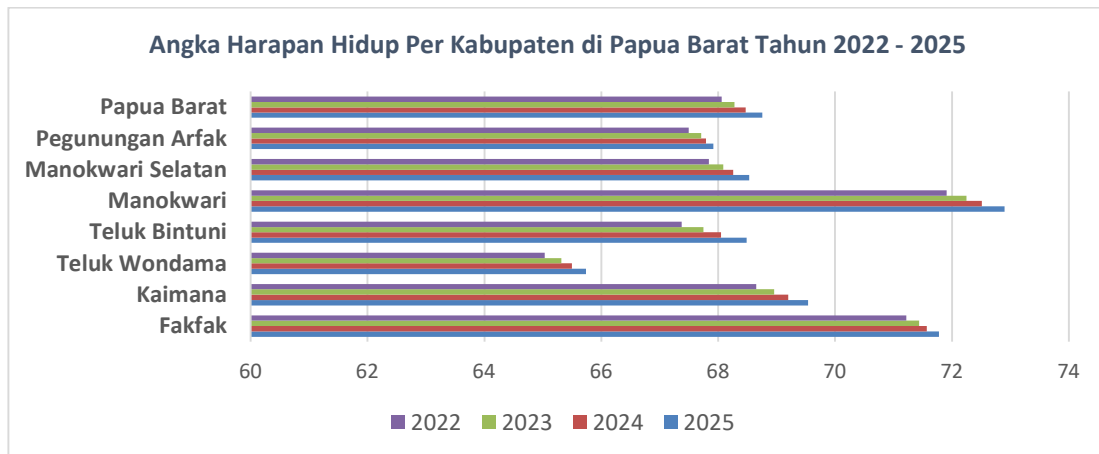


Tabel III. 4 Indikator dan Target Persentase Angka Harapan Hidup Provinsi Papua Barat Berdasarkan Renstra Dinkes 2023 – 2026

Kondisi Kinerja (2024)	Target (2025)	Capaian (2025)
68,47 Tahun	66,57 Tahun	68,76 Tahun

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu disebut juga dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (life expectancy at birth). Dari grafik Angka Harapan Hidup Papua Barat Tahun 2022-2025 diketahui bahwa terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup sejak tahun 2022 (68,06 Tahun) sampai dengan 2025 (68,76 Tahun). Angka Harapan hidup Papua barat Tahun 2025 lebih tinggi dibandingkan dengan target Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dengan capaian sebesar 68,76 Tahun dari target 66,57 Tahun.

Grafik III. 2 Angka Harapan Hidup Kabupaten di Provinsi Papua Barat Tahun 2022-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat Tahun 2025

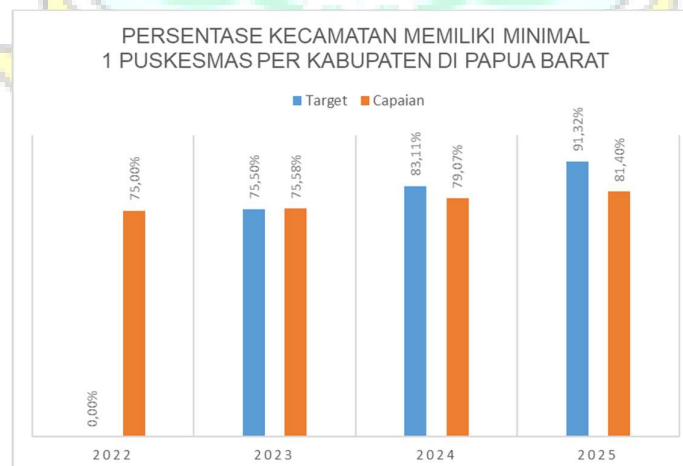
Dari gambar III.2. terlihat bahwa di Kabupaten di Provinsi Papua Barat dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2025 terjadi peningkatan Angka Harapan Hidup yang dapat mengindikasikan peningkatan status Kesehatan masyarakat. Kabupaten dengan Angka Harapan Hidup tertinggi pada Tahun 2025 adalah di Kabupaten Manokwari yakni 72,9 Tahun dan terendah di Kabupaten Teluk Wondama yakni 65,74 Tahun. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Dari grafik capaian Angka Harapan Hidup baik di Provinsi maupun Kabupaten terlihat bahwa peningkatan Angka Harapan Hidup berbanding lurus dengan kualitas kesehatan masyarakat di Papua Barat. Peningkatan Angka Harapan Hidup ini menggambarkan peningkatan derajat kesehatan penduduk yang juga memperpanjang usia harapan hidupnya dan menandakan bahwa kualitas kesehatan dan sosial ekonomi masyarakat Papua Barat telah mengalami perbaikan.

Derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan program kesehatan dan program pembangunan sosial ekonomi yang secara tak langsung dapat meningkatkan Angka Harapan Hidup. Penjabaran terkait capaian-capaian indikator bidang kesehatan yang mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup di Papua

Barat akan disajikan dalam analisa dan capaian target indikator baik pada Indikator Kinerja Utama. Walaupun secara umum Indikator Angka Harapan Hidup Papua Barat meningkat secara bertahap, namun pada beberapa Kabupaten termasuk diantaranya Kabupaten Teluk Wondama memiliki capaian Angka Harapan Hidup paling rendah dibanding Kabupaten lainnya. Angka Harapan Hidup di kabupaten Teluk Wondama menggambarkan perlunya peningkatan kinerja program baik kesehatan maupun sosial ekonomi dalam mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup masyarakatnya. Angka Harapan Hidup yang masih cukup rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori dan program pemberantasan kemiskinan. Peningkatan angka harapan hidup dari tahun ke tahun menunjukkan keberhasilan program-program pemerintah di bidang kesehatan namun peningkatan tersebut tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup itu sendiri, berupa faktor sosial maupun faktor ekonomi. Angka harapan hidup dapat dipengaruhi oleh keadaan lingkungan, ketersediaan pangan, pendidikan, kebijakan pemerintah, perekonomian masyarakat, dan sebagainya.

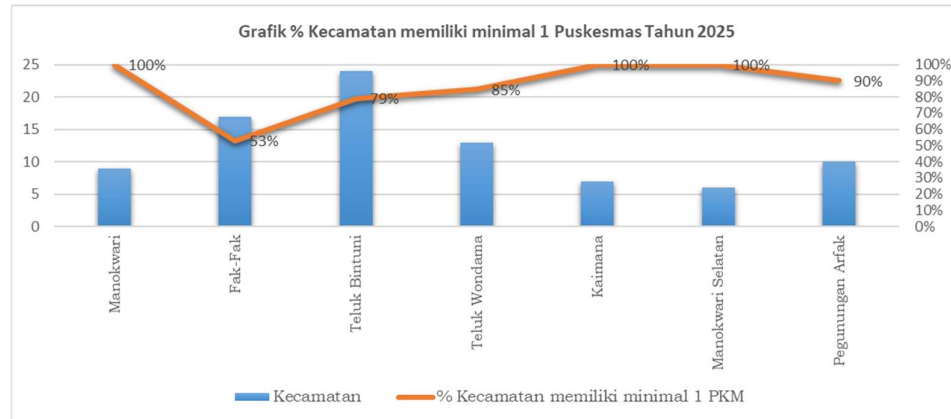
2. Persentase Kecamatan Memiliki minimal 1 Puskesmas

Grafik III. 3 Persentase Kecamatan minimal 1 Puskesmas Tahun 2022-2025



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

Grafik III. 4 Persentase Kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas Tahun 2025



Sumber : Bidang Pelayanan Kesehatan

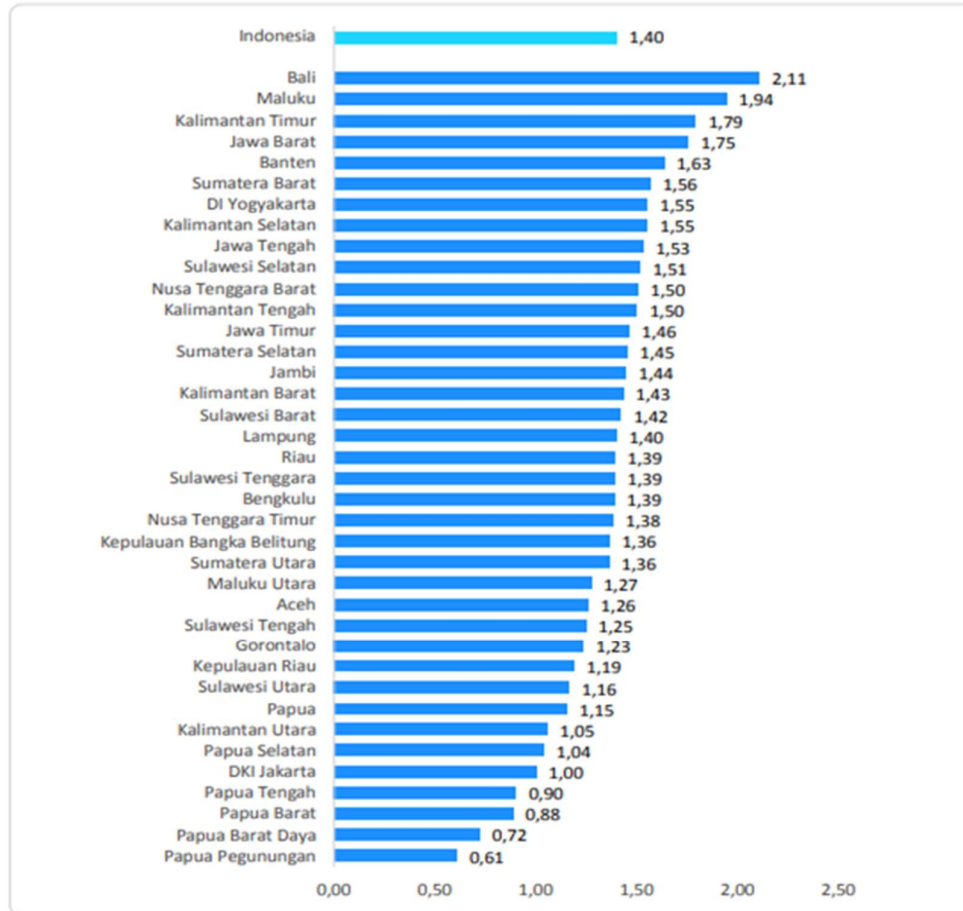
Dari data grafik di atas untuk Persentase kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas di Provinsi Papua Barat meningkat dari Tahun 2022 hingga Tahun 2025, dimana di tahun 2025 adalah sebanyak 81,40% (70 dari total 86 Kecamatan telah memiliki minimal 1 Puskesmas), dimana Kabupaten dengan persentase tertinggi yakni Kabupaten Manokwari (100%), Kabupaten Kaimana (100%) dan Kabupaten Manokwari Selatan (100%). Kabupaten dengan kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas dengan capaian terendah adalah di Kabupaten Fak-Fak (53%) dari total 17 Kecamatan. Masih rendahnya Persentase Kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas menggambarkan masih belum maksimalnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan Kesehatan.

Kabupaten di Provinsi Papua Barat telah berupaya keras membangun gedung-gedung puskesmas baru sebagai salah satu upaya meningkatkan akses pelayanan kesehatan, sebagian gedung-gedung tersebut telah difungsikan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, namun masih ada (12 Puskesmas) yang belum diregistrasikan ke Kementerian Kesehatan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 43 tahun 2019. Fenomena tersebut sebagian besar terjadi karena kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang menjalankan Puskesmas tersebut belum mencukupi jumlah dan jenisnya sebagaimana dipersyaratkan dalam regulasi yang ada.

Sebagai konsekuensinya, Puskesmas-Puskesmas baru tersebut, walaupun sudah mendapat izin operasional dari Kepala Daerah masing-masing, namun tidak mendapat Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terpisah dari Puskesmas induknya, tidak dapat bekerja sama dengan BPJS Kesehatan sehingga tidak mendapatkan kapitasi, tidak bisa mendapat dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik Akreditasi Puskesmas dan lain sebagainya. Hal ini sangat mempengaruhi aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan di Kabupaten/Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang rencana strategis kementerian kesehatan tahun 2020-2025, target Kemenkes adalah seluruh kecamatan di Indonesia memiliki minimal satu puskesmas. Rasio ideal puskesmas terhadap kecamatan adalah 1:1. Jika dibandingkan dengan kondisi di Papua Barat, maka target Kemetrian Kesehatan ini belum tercapai. Harapan Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat kedepannya adalah semua kecamatan memiliki minimal 1 Puskesmas dan target akreditasi 100% untuk semua Puskesmas yang teregistrasi di Tahun 2025.

Grafik III. 5 Rasio Puskesmas Per Kecamatan di Indonesia Tahun 2023



Sumber: Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kemenkes RI, 2024; Kementerian Dalam Negeri, 2023

Berdasarkan data Pusdatin Tahun 2023, terlihat bahwa Rasio puskesmas per kecamatan secara nasional adalah sebesar 1,4 namun untuk Papua Barat masih dibawah minimal 1 Puskesmas per Kecamatan (0,88). Upaya-upaya terus dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja dengan memaksimalkan verifikasi dan monitoring terhadap Puskesmas-Puskemas yang belum teregistrasi agar dapat teregistrasi, dan peningkatan dukungan sumber daya, pelatihan/workshop dan monitoring evaluasi yang berkelanjutan dalam mencapai target Akreditasi Puskesmas 100% di Tahun 2025.

3. Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk

Tabel III. 5 Rasio Tenaga Kesehatan

No.	URAIAN	CAPAIAN				Target Indikator
		2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Dokter Umum	288	288	289	290	RPTK Kemenkokesra No.54 Tahun 2013
2	Jumlah Dokter Spesialis	83	83	82	90	
3	Jumlah Tenaga Keperawatan	2.659	2.669	2.698	2.691	
4	Jumlah Tenaga Kebidanan	1.369	1.371	1.496	1.477	
5	Jumlah Tenaga Kesehatan	5.857	6.044	6.260	5.866	
6	Jumlah Penduduk	560.320	569.570	578.696	580.582	
	Rasio Dokter Umum Per 1000 Penduduk	0,51	0,51	0,50	0,50	0,5
	Rasio Dokter Spesialis Per 1000 Penduduk	0,15	0,15	0,14	0,16	0,12
	Rasio Tenaga Keperawatan Per 1000 Penduduk	4,75	4,69	4,66	4,64	2
	Rasio Tenaga Kebidanan Per 1000 Penduduk	2,44	2,41	2,59	2,54	1,3
	Rasio Tenaga Kesehatan Per 1000 Penduduk	10,45	10,61	10,82	10,10	

Sumber : Bidang Sumber Daya Manusia Kesehatan

Dari Grafik diatas terlihat bahwa pada Tahun 2025 jika dibandingkan dengan target RPTK Kemenkokesra No 54 Tahun 2013 terlihat bahwa mayoritas target tenaga medis tenaga Kesehatan di Papua Barat telah tercapai bahkan melebihi target, dimana terlihat bahwa Rasio Dokter spesialis Adalah 0,16 dibandingkan target 0,12 per 1000 penduduk. Demikian pula dengan rasio tenaga kepeperawatan dan tenaga kebidanan yang telah melebihi target. Namun terdapat juga indikator yang sama dengan target yang telah ditetapkan, misalnya rasio Dokter Umum per 1000 Penduduk menurut kriteria RPTK Kemenkokesra No 54 Tahun 2013 adalah 0,5 per 1000 penduduk.

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kesehatan periode 2025-2029, indikator rasio tenaga medis tenaga Kesehatan terhadap populasi pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,3 per 1000 penduduk Dimana jauh lebih rendah dibandingkan target Papua Barat Tahun 2025 yakni 11 per 1000 penduduk dengan capaian sebesar 10,10 per 1000 penduduk, hal ini mengindikasikan bahwa sekalipun mayoritas indikator telah tercapai (bila dibandingkan dengan target nasional), namun kebutuhan dan pemerataan distribusinya belum maksimal terpenuhi sehingga dibutuhkan jumlah dan jenis tenaga medis tenaga Kesehatan yang

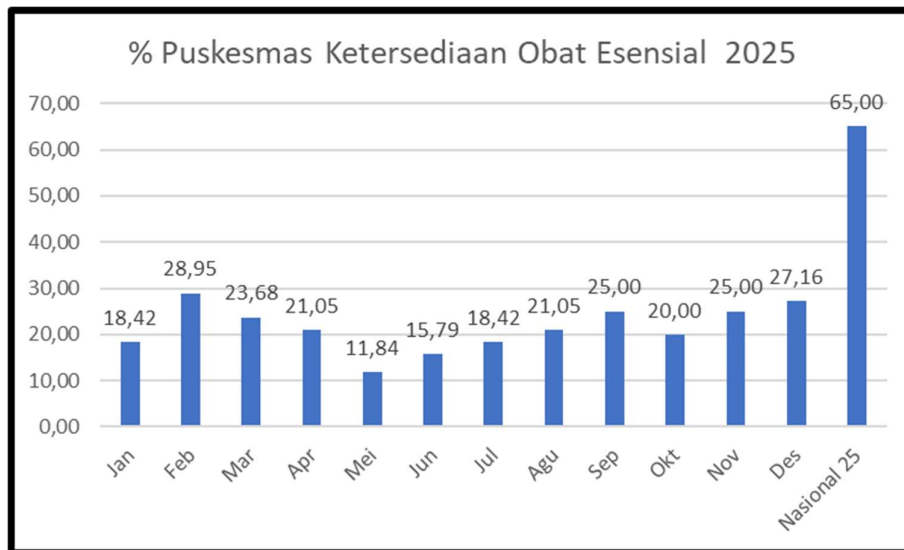
lebih besar, terutama di daerah terpencil dan tertinggal. Kualitas tenaga kesehatan juga masih belum optimal, pengembangan karier belum berjalan dengan maksimal, sistem penghargaan dan sanksi belum sebagaimana mestinya.

Masalah kurangnya tenaga kesehatan beserta jenis dan distribusinya menimbulkan dampak terhadap rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan berkualitas, di samping itu juga menimbulkan permasalahan pada rujukan dan penanganan pasien untuk kasus tertentu. Upaya untuk mengatasi keterbatasan dalam hal SDM Kesehatan yang terus akan dilaksanakan adalah dengan melakukan perencanaan kebutuhan SDM Kesehatan yang benar dan tepat pada setiap level (Provinsi, Kabupaten dan fasilitas Kesehatan), peningkatan kompetensi SDM Kesehatan termasuk dalam pemberian bantuan dalam melanjutkan pendidikan khususnya untuk Orang Asli Papua, dan monitoring evaluasi secara berkesinambungan.



4. Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%

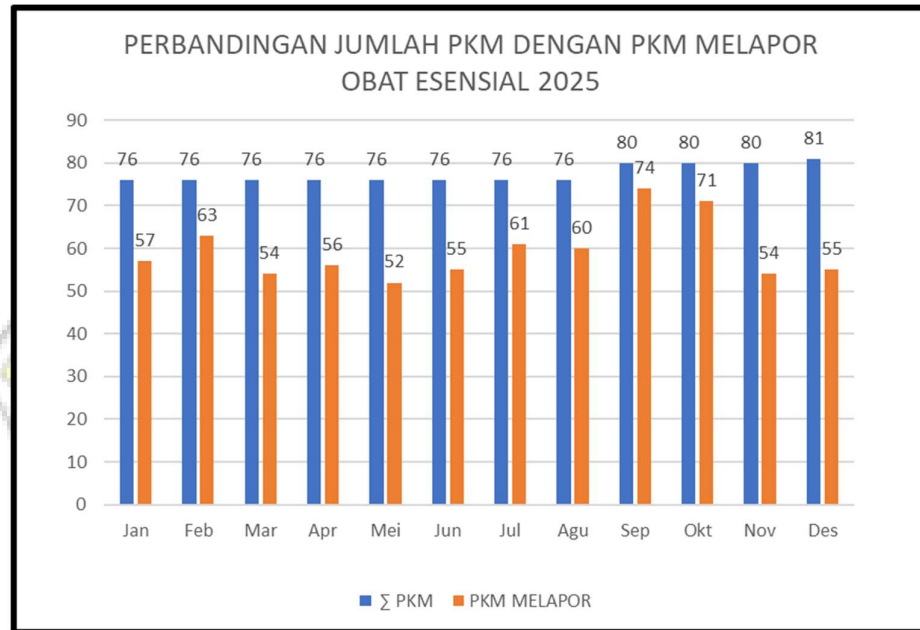
Grafik III. 6 Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial



Sumber : UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025

Hasil tersebut pada grafik diperoleh pada periode Tahun 2025 capaiannya adalah 65% dari Target indikator Kementerian Kesehatan (90%) dan Papua Barat (100%), terjadinya penurunan capaian disebabkan di tahun 2025 secara teknis terdapat perubahan tata cara pelaporan oleh puskesmas melalui sistem sehingga memerlukan pemahaman kembali bagi petugas puskesmas dalam memenuhi kepatuhan pelaporan setiap bulannya. Ketepatan waktu penyampaian pelaporan juga menjadi bagian yang mutlak diperhitungkan sebab bila melebihi waktu penyampaian maka petugas tidak dapat lagi melakukan pelaporan melalui sistem dan dianggap tidak melapor dan mempengaruhi perhitungan ketersediaan obat esensial. Untuk kepatuhan penyampaian pelaporan ketersediaan obat esensial Puskesmas yang di sandingkan dengan jumlah puskesmas per periode (bulanan) dapat digambarkan pada grafik berikut.

Grafik III. 7 Perbandingan Pelaporan Obat Esensial di Puskesmas



Sumber : UPTD Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025

Dari tabel diatas diuraikan puskesmas wajib lapor banyak yang tidak menyampaikan laporan yang seharusnya semua puskesmas melapor (100% puskesmas wajib lapor) sehingga mempengaruhi target capaian kinerja Provinsi maupun Nasional. Beberapa faktor yang mempengaruhi belum tercapainya target antara lain adalah jumlah tenaga kefarmasian yang terbatas dan kompetensi yang belum sesuai di Puskesmas, masih adanya pergantian tenaga pengelola laporan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas dan pemahaman petugas terkait pelaporan data yang valid dan tepat.

UPTD-IF Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat sesuai Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 12 Tahun 2025 tanggal 4 April 2025, merupakan bentuk keseriusan Dinas Kesehatan dalam peningkatan capaian kinerja terutama pengelolaan sediaan farmasi, bahan medis habis pakai (bmhp) dan perbekalan Kesehatan. UPTD Instalasi Farmasi merupakan unit yang sangat penting dengan tugas pokok melaksanakan penerimaan, pemeliharaan, pendistribusian, pencatatan, pendataan, pengawasan terkait ketersediaan dan penggunaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan.

Strategi dan upaya yang dilakukan dalam memperoleh keberhasilan atas pencapaian indikator kinerja persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial antara lain :

- a. Melakukan monitoring, evaluasi terhadap capaian ketersediaan obat di sarana Puskesmas;
- b. Peningkatan SDM pengelola obat terhadap pelaporan Ketersediaan obat dan Vaksin;
- c. Penetapan pengelola laporan ketersediaan obat melalui SK Kepala Puskesmas;

5. Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat

GERMAS merupakan berbagai upaya intervensi komprehensif dan holistik yang mencakup promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitative. GERMAS mengedepankan upaya promotif dan preventif guna menciptakan masyarakat yang mampu menerapkan perilaku hidup sehat yang berdampak pada kesehatan, produktivitas, lingkungan bersih, dan berkurangnya biaya berobat.

Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2017 tentang GERMAS mengamanatkan setiap pihak terkait untuk menetapkan kebijakan dan mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mewujudkan GERMAS, dengan kriteria memiliki kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat dan atau kebijakan berwawasan Kesehatan, dan melaksanakan Penggerakan Masyarakat dalam mendukung Germas, minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas sektor, pendidikan (sekolah), Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) dan atau Mitra Potensial.

Kegiatan penggerakan masyarakat dapat dilakukan secara daring (online) maupun luring (offline), dengan menyampaikan minimal 2 (dua) pesan Germas yang dilakukan minimal 3 kali setahun dengan melibatkan lintas

sektor/swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra potensial. Kegiatan dapat berupa: Kampanye, Penyebarluasan informasi melalui Media Luar Ruang, dan atau melalui Webinar. Pelibatan lintas sektor/swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra potensial dll, adalah adanya keterlibatan aktif dari lintas sektor /swasta/dunia usaha/ormas/UKBM/mitra potensial dll, sebagai penyelenggara dalam melakukan upaya penggerakan masyarakat.

Target Kementerian Kesehatan untuk tahun 2025 adalah 40%, dengan capaian target untuk Papua Barat adalah 57,14%.

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sejumlah kabupaten di Provinsi Papua Barat telah mengimplementasikan kebijakan **Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)** secara berkelanjutan dengan adanya Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Kebijakan ini menekankan pada upaya promotif dan preventif melalui perubahan perilaku hidup sehat serta peningkatan peran aktif masyarakat.

Dari 7 (tujuh) kabupaten yang ada di Provinsi Papua Barat Kabupaten yang menerapkan kebijakan **Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)** dilaporkan sebanyak **4 (empat)** Kabupaten yang menerapkan Kebijakan GERMAS atau **57,14%** dari total 7 Kabupaten

Kabupaten Manokwari sebagai ibu kota provinsi menjadi salah satu pelopor pelaksanaan GERMAS. Pemerintah daerah telah menerbitkan Perbup tentang GERMAS yang secara aktif mendorong pola hidup sehat melalui kegiatan olahraga bersama, kampanye konsumsi buah dan sayur, serta pemeriksaan kesehatan rutin bagi aparatur sipil negara dan masyarakat umum. Sinergi lintas sektor terus diperkuat guna memastikan GERMAS terintegrasi dalam berbagai program pembangunan daerah.

Kabupaten Fakfak, Pemerintah daerah telah menerbitkan Perbup tentang GERMAS penerapan GERMAS difokuskan pada peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya pola hidup sehat berbasis kearifan lokal. Pemerintah daerah mengajak masyarakat untuk memanfaatkan potensi pangan lokal yang sehat dan bergizi, serta mendorong aktivitas fisik dalam

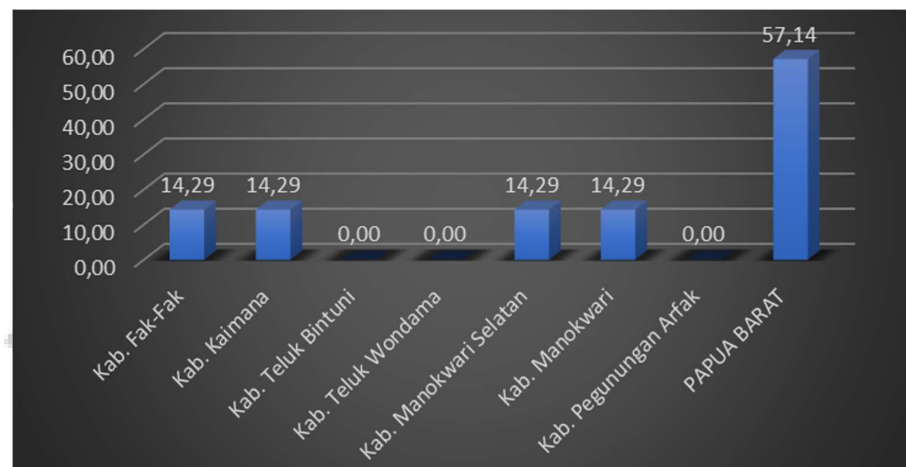
kehidupan sehari-hari. Pelayanan kesehatan primer juga diperkuat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyakit tidak menular.

Kabupaten Kaimana mengimplementasikan GERMAS dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat dan peran keluarga. Berbagai kegiatan edukasi kesehatan dilakukan hingga ke tingkat kampung, seperti sosialisasi hidup bersih dan sehat, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Sekolah berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam rangka Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM), serta gerakan tidak merokok di fasilitas umum. Pendekatan partisipatif ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran kolektif akan pentingnya kesehatan.

Kabupaten Manokwari Selatan, pelaksanaan GERMAS diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat di Tingkat Pendidikan Dasar sampai Pendidikan Menengah Atas. Dengan berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dalam rangka Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) melaksanakan, Pemeriksaan Kesehatan Gratis (PKG) di Sekolah, Pemerintah daerah mendorong aktivitas fisik melalui kegiatan kemasyarakatan, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta penguatan peran puskesmas dalam edukasi kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan menjadi kunci keberhasilan implementasi GERMAS di wilayah Manokwari Selatan.

Secara keseluruhan, penerapan kebijakan GERMAS di Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, dan Manokwari Selatan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing melalui perubahan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat yang berkelanjutan.

Grafik III. 8 Persentase Kabupaten yang melaksanakan Penggerakan GERMAS/kegiatan kesehatan lainnya



Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025

Grafik III. 9 Persentase Kabupaten yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)



Sumber : Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Papua Barat Tahun 2025

Tantangan dalam menerapkan kebijakan Gerakan Masyarakat hidup sehat adalah masih terdapat Kabupaten yang belum memiliki atau menerbitkan kebijakan Germas dan/atau kebijakan berwawasan kesehatan. Selain itu, adanya mutasi atau pergantian pegawai, belum maksimalnya pemahaman petugas kesehatan terkait indikator-indikator yang harus dicapai dan dilaporkan untuk mendukung target pencapaian. Upaya dalam

meningkatkan kinerja atau persentase kabupaten dalam menerapkan kebijakan gerakan masyarakat hidup sehat adalah dengan melaksanakan advokasi dan sosialisasi, monitoring evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan Gerakan Masyarakat hidup sehat terutama pada Kabupaten dengan capaian kinerja rendah termasuk mendorong kabupaten untuk menyusun Kebijakan atau Instruksi atau Surat Edaran terkait GERMAS/kebijakan kesehatan lainnya.

6. Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita

Prevalensi stunting pada balita di Provinsi Papua Barat Tahun 2025 tercatat sebesar 15,07%, berdasarkan data hasil pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi SIGIZI KESGA. Data ini merupakan data rutin program dan hingga saat ini belum dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan.

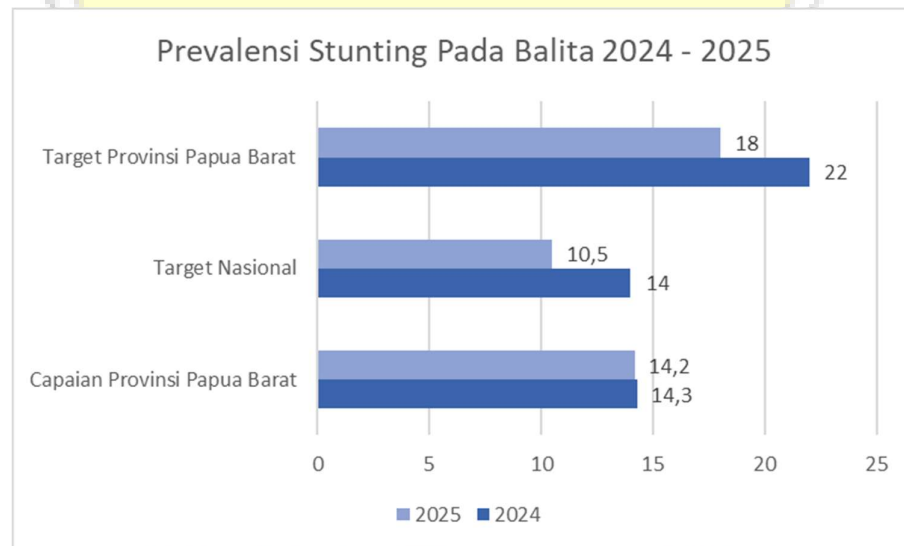
Capaian tersebut telah melampaui target Provinsi Papua Barat Tahun 2025 yang ditetapkan serta berada di bawah target nasional Tahun 2025 sebesar 18%. Hal ini menunjukkan bahwa secara kinerja program, prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat berada pada kondisi yang lebih baik dibandingkan target yang telah ditetapkan baik di tingkat provinsi maupun nasional.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, target prevalensi stunting Provinsi Papua Barat adalah 22% sedangkan target nasional Tahun 2024 sebesar 14%. Adapun capaian prevalensi stunting Provinsi Papua Barat Tahun 2024 berdasarkan data SIGIZI KESGA tercatat sebesar 14,3%. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 sebesar 15,07% relatif stabil dibandingkan capaian Tahun 2024 berdasarkan sumber data yang sama.

Sebagai pembandingan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 18,9%. Perbedaan angka antara data program SIGIZI KESGA dan SSGI disebabkan oleh perbedaan metodologi pengumpulan data, di mana SSGI merupakan survei nasional berbasis sampling, sedangkan SIGIZI KESGA merupakan data rutin pelayanan kesehatan.

Untuk Tahun 2025, data prevalensi stunting berdasarkan SSGI belum dirilis, sehingga evaluasi capaian prevalensi stunting Tahun 2025 masih mengacu pada data SIGIZI KESGA. Oleh karena itu, angka prevalensi stunting Tahun 2025 bersifat sementara dan akan disesuaikan apabila data resmi hasil survei nasional telah dipublikasikan.

Grafik III. 10 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Prevalensi Stunting pada Balita Tahun 2024-2025



Grafik diatas menyajikan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) prevalensi stunting pada balita di Provinsi Papua Barat Tahun 2025 sebesar 14,2% meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2024 (14,3%) dan memenuhi target IKU (18%) namun masih dibawah target nasional (10,5%), Data capaian provinsi bersumber dari aplikasi SIGIZI KESGA, sedangkan data capaian nasional Tahun 2025 bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI).

Dinas kesehatan Provinsi Papua Barat akan terus meningkatkan strategi atau langkah konkrit dalam upaya penurunan stunting seperti pemberian makanan tambahan ke balita stunting dan ibu hamil kurang energi kronis, upaya preventif dan promotif dan pelayanan gizi dan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat.

Penyebab tidak langsung masalah stunting juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, meliputi pendapatan dan kesenjangan ekonomi, sistem pangan, pembangunan pertanian, dan pemberdayaan perempuan, sehingga untuk mengatasi penyebab stunting, diperlukan komitmen dan kebijakan untuk pelaksanaan, keterlibatan pemerintah dan lintas sektor secara menyeluruh dan berkesinambungan.

7. Persentase Balita Gizi Buruk

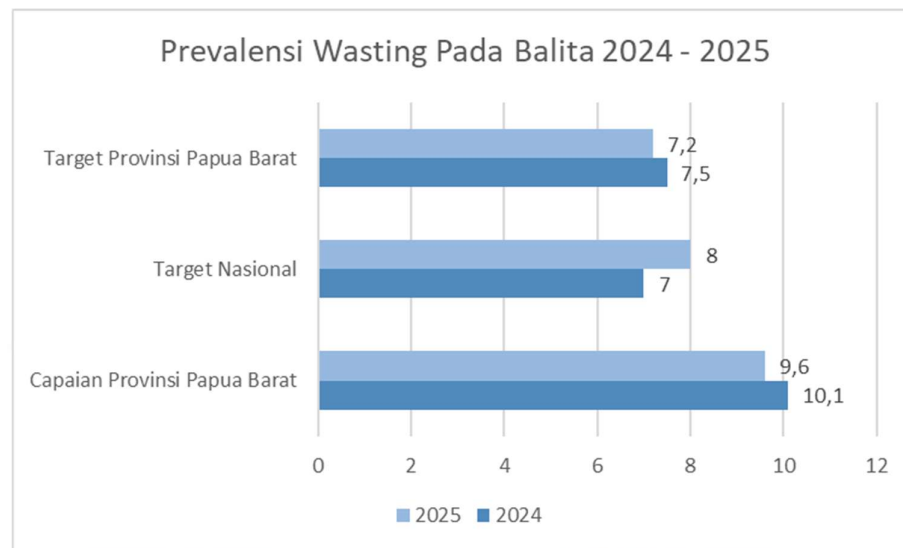
Persentase balita dengan status wasting di Provinsi Papua Barat Tahun 2025 tercatat sebesar 9,6%, berdasarkan data hasil pencatatan dan pelaporan melalui aplikasi SIGIZI KESGA. Data ini merupakan data rutin pelayanan dan dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian Kesehatan.

Capaian tersebut sejalan dengan target nasional Tahun 2025 sebesar 8%. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kinerja dalam penanganan wasting pada balita di Provinsi Papua Barat.

Jika dibandingkan dengan Tahun 2024, target wasting Provinsi Papua Barat ditetapkan sebesar 7,5%, dengan target nasional sebesar 7%. Adapun capaian wasting Provinsi Papua Barat Tahun 2024 berdasarkan data SIGIZI KESGA tercatat sebesar 10,1%. Dengan demikian, capaian Tahun 2025 sebesar 9,6% menunjukkan adanya penurunan prevalensi wasting dibandingkan Tahun 2024 berdasarkan sumber data yang sama.

Sebagai pembandingan, berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi wasting di Provinsi Papua Barat tercatat sebesar 9,2%. Perbedaan angka antara data SIGIZI KESGA dan SSGI disebabkan oleh perbedaan metodologi pengumpulan data, di mana SSGI merupakan survei nasional berbasis sampling, sedangkan SIGIZI KESGA merupakan data rutin pelayanan kesehatan.

Grafik III. 11 Perbandingan Target dan Capaian Indikator Prevalensi Wasting pada Balita Tahun 2024-2025



Grafik III.11. menyajikan target dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase balita gizi buruk di Provinsi Papua Barat Tahun 2024–2025. Data capaian provinsi bersumber dari aplikasi SIGIZI KESGA, sedangkan capaian nasional Tahun 2024 bersumber dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). Data capaian nasional Tahun 2025 belum dipublikasikan.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat terus berupaya meningkatkan kinerja dalam upaya penurunan persentase Balita gizi buruk bersama dengan langkah-langkah penurunan prevalensi stunting. Kegiatan-kegiatan intervensi spesifik dan sensitif terus akan dilaksanakan dan ditingkatkan. Advokasi dan koordinasi serta kolaborasi dengan lintas sektor juga akan terus dimaksimalkan dalam upaya penurunan persentase wasting/gizi buruk, yang terkait erat dengan capaian prevalensi stunting Papua Barat.

E. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD

Tabel III. 6 Target Indikator dan Capaian Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD Tahun 2025

No.	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					
				2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio TT : 1000 Penduduk	1.9 : 1000	2.0 : 1000	1.83 : 1000	2.1 : 1000	1.79 : 1000	2.2 : 1000	1.8 : 1000
2	Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	Persen	100	100	100	100	93,33	100	100
4	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100	100	100	100	97,14	100	96
5	Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup	Angka Kematian Ibu	101,48	85,61	137,93	70,28	175,82	59,98	180,1
6	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Angka Kematian Bayi	10,34	9,51	4,70	8,90	8,79	8,31	12,3
7	Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	Persen	15,38	20,00	28,57	40,00	100,00	60,00	100,00
8	Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persen	23,08	25,00	57,14	45,00	100,00	65,00	100,00
9	Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Persen	n.a	55,00	14,29	65,00	14,29	75,00	28,57
10	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten/Kota	0	1	1	1	1	2	1

No.	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					
				2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Persen	29	35	85	50	87	75	77
12	Prevalensi HIV	Persen	3,12	3	2,3	2,5	2,3	2	4,00
13	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	9,42	9	13,00	8	12,27	7	18,44
14	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)	Kabupaten/Kota	1	2	7	4	6	6	6
15	Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	Persen	63,7	65	95	80	89	95	80
16	Capaian Universal Health Coverage (UHC)	Persen	100	100	111,57	100	107,26	100	102,11
17	Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persen	43,21	44,29	14,28	45,40	36,25	46,53	43
18	Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	Persen	51,35	55	84,21	70	70,83	85	65
19	Persentase FKTP Terakreditasi	Persen	42,94	50	56,57	55	92,5	60	95,12
20	Jumlah Kematian Jemaah Haji	Orang	0	0	2	0	1	0	3
21	Jumlah Pelayanan Kesehatan Bergerak yang dilaksanakan	Layanan	6	3	5	3	4	3	5
22	Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persen	0	50	23	55	69,1	60	42,67
23	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100	100	100	100	100	100	100

No.	Indikator Program	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode	Target Capaian Setiap Tahun					
				2023		2024		2025	
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	Tidak Ada UKOT	100	Tidak Ada UKOT	100	Tidak Ada UKOT	100	Tidak Ada UKOT
25	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	14	20	19	35	24,05	55	24,18
26	Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang	14	29	19	30	21	35	28
27	Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	Persen	85,98	90	95,63	95	96,1	100	102,56
28	Persentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu)	Persen	70,32	75	33,9	80	41,86	90	57,14
29	Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kabupaten/Kota	2	2	6	4	3	6	4
30	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen	100	100	100	100	92,14	100	42,86

F. Realisasi Anggaran

Dalam Rangka menunjang penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang cukup memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk Program dan Kegiatan Organisasi Perangkat daerah (OPD), berikut adalah Laporan Alokasi dan Realisasi Anggaran per Program/ Kegiatan Tahun 2025 pada Dinas Kesehatan Papua Barat bisa dilihat pada Tabel berikut ini :

Tabel III. 7 Alokasi Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Lakip	Rp. 70.379.335.661				Rp. 70.379.335.661			Rp. 50.747.084.245	
		1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 133.934.660				Rp. 133.934.660			Rp. 127.605.948	
		1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 98.934.660	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	Dokumen	Rp. 98.934.659,50	1	Dokumen	Rp. 93.325.948	94,33%
		1,2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 35.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Laporan	Rp. 35.000.000	1	Laporan	Rp. 34.280.000	97,94%
		2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 66.034.667.000				Rp. 66.034.667.000			Rp. 46.467.842.106	
		1,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 65.999.667.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	105	Orang/Bulan	Rp. 65.999.667.000	105	Orang/Bulan	Rp. 46.432.842.106	70,35%
		1,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 35.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	1	Laporan	Rp. 35.000.000	1	Laporan	Rp. 35.000.000	100,00%
		4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 200.000.000				Rp. 200.000.000			Rp. 195.300.000	
		1,2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 200.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	Rp. 200.000.000	1	Dokumen	Rp. 195.300.000	97,65%
		5 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 854.855.450				Rp. 854.855.450			Rp. 841.554.659	
		1,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp. 20.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp. 20.000.000	1	Paket	Rp. 20.000.000	94,33%
		1,2 Penyediaan bahan logistik kantor	Rp. 72.038.450	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	Paket	Rp. 72.038.450	1	Paket	Rp. 68.117.000	94,56%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
						K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		1,3	penyediaan Barang Cetakan dan pengadaan	Rp 161.982.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengadaan yang Disediakan	1	Paket	Rp 161.982.000	1	Paket	Rp 161.769.000	99,87%
		1,4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 54.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1	Dokumen	Rp 54.000.000	1	Dokumen	Rp 54.000.000	100,00%
		1,5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 135.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1	Laporan	Rp 135.000.000	1	Laporan	Rp 134.954.660	99,97%
		1,6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 411.835.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	Laporan	Rp 411.835.000	1	Laporan	Rp 402.713.999	97,79%
		6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 760.000.000				Rp 760.000.000			Rp 747.000.000	
		1,1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 760.000.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Unit	Rp 760.000.000	1	Unit	Rp 747.000.000	98,29%
		7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp 2.287.713.551				Rp 2.287.713.551			Rp 2.259.704.228	
		1,1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 657.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	Rp 657.000.000	1	Laporan	Rp 655.158.033	99,72%
		1,2	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Rp 1.630.713.551	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	Rp 1.630.713.551	1	Laporan	Rp 1.604.546.195	98,40%
		8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 108.165.000				Rp 108.165.000			Rp 108.077.304	
		1,1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 78.165.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3	Unit	Rp 78.165.000	3	Unit	Rp 78.150.304	99,98%
		1,2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	34	Unit	Rp 30.000.000	34	Unit	Rp 29.927.000	99,76%
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas		Rp 50.130.613.988				Rp 50.130.613.988			Rp 41.169.649.749	
		1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 23.315.930.524				Rp 23.315.930.524			Rp 20.931.824.519	
			Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 400.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit	Rp 400.000.000	1	Unit	Rp 397.992.000	99,50%
		1,1	Pengembangan Rumah Sakit	Rp 10.444.708.084	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	Unit	Rp 10.444.708.084	1	Unit	Rp 10.644.541.976	101,91%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA		KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
						K	Rp.		K	Rp.		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
			1.2 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Rp 492.675.914	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	5	Layanan	Rp 492.675.914	5	Layanan	Rp 399.331.597	81,05%
			1.3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 2.202.100.000	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	1	Unit	Rp 2.202.100.000	1	Unit	Rp 1.168.182.000	53,05%
			1.4 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 292.082.846	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui	2	Unit	Rp 292.082.846	2	Unit	Rp 250.905.307	85,90%
			1.5 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 5.471.187.507	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	7	Unit	Rp 5.471.187.507	7	Unit	Rp 4.936.487.468	90,23%
			1.6 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 2.320.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1	Paket	Rp 2.320.000.000	1	Paket	Rp 1.444.792.671	62,28%
			1.7 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 1.693.176.173	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	1	Dokumen	Rp 1.693.176.173	1	Dokumen	Rp 1.689.591.500	99,79%
			2 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 24.188.192.857				Rp 24.188.192.857			Rp 18.048.939.003	
			1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Rp 2.827.630.928	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1100	Orang	Rp 2.827.630.928	1100	Orang	Rp 656.272.750	23,21%
			1.2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 1.396.500.000	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000	Orang	Rp 1.396.500.000	1100	Orang	Rp 45.297.780	3,24%
			1.3 pengolahan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Rp 440.838.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1	Dokumen	Rp 440.838.000	1	Dokumen	Rp 431.502.234	97,88%
			1.4 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1	Dokumen	Rp 75.328.000	1	Dokumen	Rp 73.070.000	97,00%
			1.5 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1	Dokumen	Rp 75.328.000	1	Dokumen	Rp 75.028.000	99,60%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		1,6 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1	Dokumen	Rp 150.000.000	1	Dokumen	Rp 149.046.436	99,36%
		1,7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 636.810.425	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1	Dokumen	Rp 636.810.425	1	Dokumen	Rp 217.076.000	34,09%
		1,9 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp 381.911.808	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1	Dokumen	Rp 381.911.808	1	Dokumen	Rp 315.616.150	82,64%
		1,10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 2.235.895.058	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	1	Dokumen	Rp 2.235.895.058	1	Dokumen	Rp 1.505.293.580	67,32%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp 125.840.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1	Dokumen	Rp 125.840.000	1	Dokumen	Rp 51.367.914	40,82%
		Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 154.593.982	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	1	Dokumen	Rp 154.593.982	1	Dokumen	Rp 127.264.986	82,32%
		1,11 pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Rp 8.757.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1	Dokumen	Rp 8.757.540.000	1	Dokumen	Rp 8.632.734.650	98,57%
		1,12 Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 870.217.375	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1	Dokumen	Rp 870.217.375	1	Dokumen	Rp 236.008.726	27,12%
		1,13 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 659.157.612	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 659.157.612	1	Dokumen	Rp 565.972.326	85,86%
		1,14 Pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan	Rp 3.852.073.320	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp 3.852.073.320	1	Dokumen	Rp 3.721.963.183	96,62%
		1,16 Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1	Dokumen	Rp 75.328.000	1	Dokumen	Rp 74.982.050	99,54%
		1,17 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 232.940.741	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit	Rp 232.940.741	1	Unit	Rp 200.212.427	85,95%
		1,18 Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Rp 160.261.709	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1	Dokumen	Rp 160.261.709	1	Dokumen	Rp 41.760.000	26,06%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K	Rp.		K	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		1,19 Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rp 277.047.000	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1	Paket	Rp 277.047.000	1	Paket	Rp 128.888.401	46,52%
		1,20 Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Rp 802.950.898	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1	Dokumen	Rp 802.950.898	1	Dokumen	Rp 799.581.410	99,58%
		3 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 313.469.806				Rp 313.469.806			Rp 290.928.856	
		1,1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 313.469.806	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1	Dokumen	Rp 313.469.806	1	Dokumen	Rp 290.928.856	92,81%
		4 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 1.440.520.739				Rp 1.440.520.739			Rp 1.136.937.361	
		1,1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Rp 826.711.598	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2	Unit	Rp 826.711.598	2	Unit	Rp 677.513.955	81,95%
		1,2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 613.809.141	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2	Unit	Rp 613.809.141	2	Unit	Rp 459.423.406	74,85%
		5 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 872.500.061				Rp 872.500.061			Rp 761.020.010	
		1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Rp 279.254.147	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 279.254.147	1	Dokumen	Rp 244.042.502	87,39%
		1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Rp 345.244.565	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1	Dokumen	Rp 345.244.565	1	Dokumen	Rp 320.613.366	92,87%
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Rp 63.886.225.679				Rp 63.886.225.679			Rp 13.400.577.930	
		1 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2.543.410.720				Rp 2.543.410.720			Rp 1.983.176.168	
		1,1 peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	Rp 2.054.075.356	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	30	Orang	Rp 2.054.075.356	30	Orang	Rp 1.621.448.968	78,94%
		1,2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 489.335.364	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen	Rp 489.335.364	1	Dokumen	Rp 361.727.200	73,92%

No	SASARAN STRATEGIS OPD SESUAI RENSTRA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	INDIKATOR	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN OPD PROVINSI TAHUN BERJALAN (2025) YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RKPD PROVINSI YANG DIEVALUASI			REALISASI CAPAIAN %
					K		Rp.	K		Rp.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 = (6 : 9)*100%
		2 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 4.992.414.959				Rp 4.992.414.959			Rp 3.417.331.562	
		1,1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Rp 4.992.414.959	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan bagi Orang Asli Papua	23	Orang	Rp 4.992.414.959	23	Orang	Rp 3.417.331.562	68,45%
		3 Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	Rp 56.350.400.000				Rp 56.350.400.000			Rp 8.000.070.200	
		1,1 Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Rp 56.350.400.000	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	14000	Orang	Rp 56.350.400.000	17315	Orang	Rp 8.000.070.200	14,20%
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	Rp 276.511.438				Rp 276.511.438			Rp 274.644.363	
		1 Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 213.829.189				Rp 213.829.189			Rp 213.020.363	
		1,1 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang PAK	Rp 213.829.189	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Perizinan	3	Sarana	Rp 213.829.189	3	Sarana	Rp 213.020.363	99,62%
		2 Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	Rp 62.682.249				Rp 62.682.249			Rp 61.624.000	
		1,1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 62.682.249	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindak lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	1	Sarana	Rp 62.682.249	1	Sarana	Rp 61.624.000	98,31%
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Rp 783.288.628				Rp 783.288.628			Rp 780.536.314	
		1 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 293.430.557				Rp 293.430.557			Rp 293.029.154	
		1,1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat daerah Provinsi	Rp 293.430.557	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas pemberdayaan masyarakat	1	Dokumen	Rp 293.430.557	1	Dokumen	Rp 293.029.154	99,86%
		3 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp 489.858.071				Rp 489.858.071			Rp 487.507.160	
		1,1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 489.858.071	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1	Dokumen	Rp 489.858.071	1	Dokumen	Rp 487.507.160	99,52%
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan	Persentase Balita Gizi Buruk	Rp 2.972.941.918				Rp 2.972.941.918			Rp 2.864.209.864	
		1 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	Rp 2.972.941.918				Rp 2.972.941.918			Rp 2.864.209.864	
		1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2.972.941.918	meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	1	Dokumen	Rp 2.972.941.918	1	Dokumen	Rp 2.864.209.864	96,34%

G. Dokumentasi Kegiatan

Gambar III. 1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak



Gambar III. 2 Pengelolaan Pelayanan Gizi Masyarakat



Gambar III. 3 Pengelolaan Pelayanan Penyakit Malaria



Gambar III. 4 Pengelolaan Pelayanan Penyakit HIV AIDS



Gambar III. 5 Pengelolaan Pelayanan Penyakit TBC



Gambar III. 6 Pengelolaan Pelayanan Imunisasi



Gambar III. 7 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bergerak



Gambar III. 8 Pembinaan dan Pengawasan Perizinan PBF dan PAK



Gambar III. 9 Pembangunan Gedung KJSU Tahap III



Pekerjaan Groundtank dan Pekerjaan Beton



Pekerjaan Fabrikasi Rangka Baja



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

BAB IV

PENUTUP

BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2025 disusun berdasarkan peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai unsur Penyelenggara Negara, wajib untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis (Renstra) yang telah ditetapkan instansi.

Dalam rangka pelaksanaan inpres tersebut maka ditetapkan keputusan Kepala LAN nomor 239/IX/8/2003 tentang pendoman penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai acuan dalam penyusunan LAKIP.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2025 menggambarkan pencapaian kinerja selama Tahun 2025. Pencapaian kinerja berupa pelaksanaan kegiatan ini disusun dan dilaksanakan berdasarkan rencana kinerja tahun 2025 yang mengacu pada rencana strategis 2023 – 2026 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.

Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat melaksanakan 59 (Lima Puluh Sembilan) sub kegiatan dan 19 (Sembilan Belas) kegiatan dalam 5 (Lima) program untuk memenuhi 6 (Enam) sasaran strategis sesuai dengan rencana kinerja tahun 2025.

Total Pagu Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan sasaran strategis tersebut sebesar Rp. 188.428.917.311,58 (Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan juta Sembilan Ratus Tujuh Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Koma Lima Puluh Delapan Rupiah) dari jumlah tersebut di atas realisasi serapannya sebesar Rp. 109.017.931.065,00,- (Seratus Sembilan Milyar Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Enam Puluh Lima Rupiah) atau 57,86%

dari anggaran yang tersedia, dengan uraian sasaran strategis dengan persentasenya sebagai berikut :

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah (72,11%)
2. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan yang merata (82,12%)
3. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata (20,98%)
4. Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan (99,32%)
5. Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat (99,65%)
6. Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin (96,34%)

1. Permasalahan dan pemecahan masalah :

a. Kurang optimalnya tingkat penyerapan anggaran :

- 1) Penyerapan anggaran dan output kinerja belum optimal disebabkan Terdapat proses efisiensi anggaran sehingga terjadi pergeseran jenis belanja yang tidak bisa dimaksimalkan realisasinya. Pelaksanaan kegiatan juga mayoritas menunggu pagu pergeseran ditetapkan, sehingga menghambat realisasi anggaran.
- 2) Program Papua Barat Sehat dengan anggaran Rp. 50.000.000.000,- (Lima Puluh Milyar Rupiah), hanya dapat direalisasikan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah), dikarenakan regulasi/Peraturan Gubernur yang menjadi landasan pelaksanaannya baru ditetapkan Tanggal 30 Oktober 2025, sehingga waktu pelaksanaan hanya dua (2) bulan yakni November dan Desember.
- 3) Kurangnya kuantitas dan Kualitas ASN khususnya dalam pengelolaan keuangan dan penyelesaian SPJ secara benar dan tepat waktu pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

- 4) Belum berjalannya secara optimal Sistem Pengendalian Interen (SPI) dan belum dibuatnya Standar Operasional dan Prosedur (SOP) terutama SOP terkait Evaluasi dan Monitoring Pengelolaan Anggaran pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat.
- b. Strategi pemecahan masalah berdasarkan masalah-masalah yang telah diidentifikasi tersebut, strategi pemecahan masalah yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :
- 1) Meningkatkan kuantitas dan Kualitas aparat dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat dengan melakukan penempatan ASN sesuai dengan disiplin ilmu dan kebutuhan.
 - 2) Membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) baik untuk kegiatan Admintrasi Umum ataupun Kegiatan Teknis sehingga lebih memudahkan dalam hal Evaluasi dan Monitoring pengelolaan Anggaran OPD Dinas Kesehatan Papua Barat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat ini dibuat, kekurangan dan kelemahan semoga bapak dan ibu sekalian berkenan memberikan kritik dan saran agar kami dapat memperbaiki laporan ini di tahun-tahun yang akan datang.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu untuk penyelesaian laporan ini, Semoga Tuhan Memberkati .

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI PAPUA BARAT,

dr. ALWAN RIMOSAN, Sp.B.FINACS
PEMBINA TK. I

NIP.19691027 200012 1 004



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

LAMPIRAN

LAMPIRAN

- A.** Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- B.** Formulir E.55 Evaluasi Hasil Terhadap Renja OPD Lingkup Provinsi Tahun 2025;
- C.** SK IKU 2023 - 2026
- D.** Pohon Kinerja;
- E.** Cascading dan Keselarasan;
- F.** Crosscutting;
- G.** Rencana Aksi
- H.** Prestasi / Penghargaan yang diperoleh.





Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

***Jalan Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Kompleks Perkantoran
Gubernur Papua Barat, Arfai, Manokwari,
Kode Pos : 98315***

***RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT***

***Jalan Angkasa Mulyono, Kompleks Irman Jaya, Amban Manokwari,
Kode Pos : 98312***



Kunjungi Tautan Kami

www.dinkes.papuabaratprov.go.id

2025



PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT



<https://dinkes.papuabaratprov.go.id>



dinaskesehatanprovpapuabarat@gmail.com



Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	B	Kategori	70.379.335.661	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Kab. Manokwari	RKA dan DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun Berjalan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	35.000.000,00	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
											2	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Manokwari	Kinerja Dinas Kesehatan provinsi papua Barat per tahun anggaran	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	98.934.659,50	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
									2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Manokwari	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/Bulan	65.999.667.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Manokwari	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	35.000.000,20	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
									3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Manokwari	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen	200.000.000,00	Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
									4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Manokwari	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	20.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Manokwari	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	72.038.450,19	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Manokwari	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	161.982.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Manokwari	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan	135.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Papua Barat	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	411.835.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

[illegible]

[illegible]

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan		Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																	Target	Anggaran (Rp)	
					Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100	Persen												
					Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	85	Persen												
					Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	100	Persen												
					Prevalensi HIV	2	Persen												
					Jumlah Kematian Jemaah Haji	0	orang												
					Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	2.2:1000	: 1000 Rasio TT : 1000 Penduduk												
									1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)		Kab. Wondam, Kab. Pegunungan Arfak, Manokwari Selatan	Terlaksananya pengembangan pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	3 Layanan	492.675.913,60	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											1,1	Pelayanan Kesehatan Bergerak						492.675.913,60	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Kab. Manokwari	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana	1 Unit	2.202.100.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											2,1	Rehab Pustu						1.000.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											2,2	listrik air, internet dinkes dan labkesda						1.202.100.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan		Papua Barat	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	8 Unit	5.471.187.507,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
											3,1	Pengadaan PC dan Printer Labkesda					281.482.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3,2	Pengadaan mobil Ambulance RS Kabupaten Pegunungan Arfak					-	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3,3	Angkutan operasional gudang obat, spesifikasi hilux 4x4					500.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3,4	Sanitarian kit					117.962.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3,5	Mebel labkesda					850.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3,6	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kab. Manokwari					759.883.721,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3,7	Pengadaan Ambulance PKM Fafurwar, Teluk Bintuni					1.000.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3,8	Pengadaan Motor					43.085.011,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan		Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																	Target	Anggaran (Rp)	
											3,9	Pengadaan Ambulance Jenazah					1.523.844.775,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	
											3.10	Pengadaan Alat Kesehatan					394.930.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	
											4	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan		Kab. Manokwari	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	1 Unit	292.082.846,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											5	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		Papua Barat	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	1 Dokumen	2.320.000.000,00	UPTD FARMASI
											6	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan		Papua Barat	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1.693.176.173,00	UPTD FARMASI
											6,1	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor						50.608.000,00	UPTD FARMASI
											6,2	Bahan Repacking Distribusi Obat dan BMHP UPTD Farmasi Papua Barat						55.782.000,00	UPTD FARMASI
											6,3	Distribusi Obat, BMHP, dan Vaksin dari Provinsi ke Kab/Kota (UPTD Instalasi Farmasi Provinsi)						1.586.786.173,00	UPTD FARMASI

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan		Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																	Target	Anggaran (Rp)	
											7	Pengembangan Rumah Sakit			Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1 Unit	10.444.708.084,40	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											8	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya		Kab. Kaimana			1 Paket	400.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
									2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	1000 Orang	2.827.630.928,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	1000 Orang	1.396.500.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak		Papua Barat	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (AKI) per tahun dan Angka Kematian anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	1 Dokumen	440.838.000,00	Seksi Kesga dan Gizi
											3,1	analisa data, pertemuan evaluasi AKI AKB, koordinasi LP LS dalam mendukung penurunan stunting						440.838.000,00	Seksi Kesga dan Gizi

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
											4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Papua Barat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen	75.328.000,00	Seksi Kesga dan Gizi
											4.1	Supervisi Program Usia Produktif bagi Pengelola Program dan tenaga Kesehatan					75.328.000,00	Seksi Kesga dan Gizi
											5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen	75.328.000,00	Seksi Kesga dan Gizi
											5.1	Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tk. Kabupaten di Provinsi					75.328.000,00	Seksi Kesga dan Gizi
											6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	1 Dokumen	150.000.000,00	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
											6,1	monitoring evaluasi program kesehatan kerja dan olahraga dan kesehatan lingkungan terpadu dan kebugaran					150.000.000,00	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
											7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen	636.810.424,81	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
											7,1	ijin lingkungan labkesda					317.827.005,87	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
											7,2	workshop kesehatan lingkungan					172.375.369,13	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
											7,3	pemusnahan limbah medis					146.608.049,81	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
											8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisonal, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Papua Barat	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	1 Dokumen	381.911.808,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
											9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Papua Barat	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1 Dokumen	2.235.895.058,00	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular , Seksi PTM dan kesehatan jiwa, seksi surveilans dan imunisasi
											9,1	pembinaan pendampingan monev					246.570.500,00	Seksi PTM dan kesehatan jiwa
											9,2	koornisasi/advokasi/sosiali sasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit					101.242.500,00	Seksi PTM dan kesehatan jiwa
											9,3	Integrasi Pelayannan/pengelolaan penyakit menular dan tidak menular di masyarakat OAP					752.493.766,00	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
											9,4	Harmonisasi Perda KTR (kawasan Tanpa Rokok)					336.235.600,00	Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa
											9,5	Screening PTM					165.831.631,00	Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa
											9,6	Alat bantu untuk Penderita Kusta					150.000.000,00	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
											9,7	Alat Laboratorium Lain , Untuk Pemeriksaan Malaria					90.968.011,00	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
											9,8	Alat Laboratorium Lain , Untuk Pemeriksaan PTM					140.674.500,00	Seksi PTM dan Kesehatan Jiwa
											9,9	Operasional Rumah Perlindungan					251.878.550,00	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
											10	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen	8.757.540.000,38	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
											10,1	Kontribusi luran PBI JK					8.757.540.000,38	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
											11	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen	870.217.375,00	Seksi Surveilans & Imunisasi
											11,1	verifikasi sinyal/rumor KLB					85.132.500,00	Seksi Surveilans & Imunisasi
											11,2	validasi data sasaran pencegahan dan pengendalian penyakit					121.242.500,00	Seksi Surveilans & Imunisasi
											11,3	Pelacakan kasus penyakit potensi KLB/PD3I di Masyarakat OAP, Surveilans anak sekolah OAP, Surveilans Berbasis Masyarakat OAP					663.842.375,00	Seksi Surveilans & Imunisasi
											12	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Papua Barat	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen	659.157.612,00	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
											13	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Papua Barat	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	3.852.073.320,40	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset; Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian; Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											13,1	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)					738.496.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											13,2	Pelayanan kesehatan keg HKN, PI, Pesparawi					200.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											13,3	Harmonisasi 4 draft lintas program di Dinkes (Pergub)					300.902.000,00	Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian
											13,4	transport klinik kajati					43.200.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											13,5	Pelayanan klinik kesehatan Kantor Gubernur					164.800.000,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
											13,6	Integrasi Layanan Primer (ILP)					412.711.320,40	Seksi Kesehatan Keluarga & Gizi
											13,7	Hibah PMI					1.000.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											13,8	Audiensi RS.Vertikal Papua Barat					141.940.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											13,9	Koordinasi, Advokasi dan Monev Sinergisme Program prioritas astacita presiden					140.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											13.10	Pengadaan Laptop dan PC Bagi petugas penginput data e-ppgbm (data stunting) di puskesmas					600.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											13.11	Pengadaan Laptop Bagi petugas puskesmas dalam rangka ILP					10.024.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											13.12	Tim Medis Pengawalan Kunjungan Gubernur					100.000.000,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan	1 Dokumen	154.593.982,40	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
											15	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Papua Barat	Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1 Unit	232.940.741,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											15,2	Workshop Public Safety Center (PSC) 119 Tingkat Provinsi Papua Barat					232.940.741,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											16	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik		Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1 Dokumen	160.261.709,25	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
											16,1	Pembiayaan pendampingan rujukan ODGJ					160.261.709,25	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
											17	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Papua Barat	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	1 Paket	277.047.000,00	Seksi Surveilans & Imunisasi
											18	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	802.950.898,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											18,1	pelayanan imunisasi rutin di masyarakat diutamakan OAP					802.950.898,00	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
											19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Papua Barat	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen	125.840.000,00	Seksi Surveilans dan Imunisasi
											20	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Papua Barat	Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan	1 Dokumen	75.328.000,00	Seksi Surveilans dan Imunisasi
									3	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Kab. Manokwari, Manokwari Selatan, Masyepi	Terlaksananya Pengelolaan Sitem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen	313.469.806,00	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas; UPTD Farmasi
											1,1	Pertemuan penguatan sistem informasi logistik terintegrasi					168.569.806,00	UPTD FARMASI
											1,2	Pembuatan Profil kesehatan					144.900.000,00	Sub Bagian Program, Informasi dan Humas
									4	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Papua Barat	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	2 unit	826.711.598,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
											1,1	Peningkatan Kapasitas Penanggung Jawab Data ASPAK dan UPAK (RMC) Tingkat Provinsi Papua Barat					272.940.741,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											1,2	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Rujukan Terintegrasi Papua Barat					153.820.510,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
											1,3	Pertemuan Implementasi KRIS JKN					399.950.347,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
											2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Papua Barat	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	2 Unit	613.809.141,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan seksi alkes dan PKRT
											2,1	Monev Terpadu Pelayanan Kesehatan Primer Tingkat Provinsi Papua Barat					238.481.141,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											2,2	Peningkatan mutu dan keselamatan pasien					75.328.000,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											2,3	Monev Perijinan dan standarisasi Alkes					300.000.000,00	Seksi alkes dan PKRT
									5	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS		Prevalensi HIV	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Dokumen	279.254.147,20	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
											2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Dokumen	345.244.564,60	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan		Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																	Target	Anggaran (Rp)	
											3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria			Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	1 Dokumen	248.001.349,60	Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Sumber daya manusia kesehatan yang memadai	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	55	Persen	63.886.225.679											
					Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	35	Orang												
					Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	100	Persen												
									1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		Papua Barat	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	30 Orang	2.054.075.356,00	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan; Seksi Surveilans dan Imunisasi; Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga
											1.1	Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini, dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN) dan Wilayah						289.969.000,00	Seksi Surveilans dan Imunisasi
											1,2	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota						233.649.000,00	Seksi Surveilans dan Imunisasi
											1,3	Pelatihan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Pada Situasi Bencana						490.749.000,00	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan kerja dan Olahraga
											1,4	Pelatihan PKN, PKA, PKP dan Pembiayaan S2						914.760.956,00	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan		Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																	Target	Anggaran (Rp)	
											1,5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						124.947.400,00	Subbagian Hukum, Umum dan Kepegawaian
											2	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan			Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen	489.335.364,40	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
											2.1	Pertemuan Rencana Kebutuhan, monev data SISDMK diutamakan OAP, pengantaran dan penjemputan Nusantara Sehat ke Kabupaten, perekrutan nakes teladan						489.335.364,40	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua			Terlaksanya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkatkan bagi Orang Asli Papua	23 Orang	4.992.414.958,80	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
											1.1	PPDS afirmasi						4.992.414.958,80	Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
									3	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	1	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN			Meningkatnya Kesehatan Bagi Orang Asli Papua	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	10000 orang	56.350.400.000,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
											1.1	PBPU Pemda (BPJS OAP)						6.350.400.000,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
											1.2	Program Papua Barat Sehat						50.000.000.000,00	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	100	Persen	276.511.438											

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan		Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																	Target	Anggaran (Rp)	
					Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	6,00	Kabupaten												
									1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi		Papua Barat	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen	293.430.556,90	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
											1.1	Peningkatan Kompetensi/Keterampilan Kader bagi Mama Kader Posyandu khusus OAP Kabupaten di Provinsi Papua Barat						293.430.556,90	Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
									2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM		Papua Barat	Terlaksananya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen	489.858.071,35	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
											1.1	Pelayanan kesehatan dan pemberdayaan kesehatan di masyarakat kampung OAP		(Kaimana, Pegaf dan Mansel)				489.858.071,35	Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gisi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	100	Persen	2.972.941.918											

No	Sasaran Strategis OPD sesuai Renstra 2023-2026	No	Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target		Pagu Anggaran (Rp)	No	Kegiatan	No	Sub Kegiatan	Tempat Sub Kegiatan	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Target Kinerja Anggaran		Seksi/ Subbag
																Target	Anggaran (Rp)	
										Penyediaan Layanan Kesehatan untuk 1 UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Papua Barat	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1 Dokumen	2.972.941.917,80	Seksi Kesga dan Gizi
											1.1	Penguatan Pelayanan Gizi Spesifik di Puskesmas untuk Percepatan Penurunan Stunting, Penyediaan Pangan Bergizi Yang Mengutamakan Protein Hewani dan Pengolahan dan Pola Konsumsinya yang sesuai kaidah Pola Gizi Berimbang dalam penanganan Stunting, kampanye pangan lokal, Workshop di Provinsi Penguatan Pelayanan Gizi Spesifik di Puskesmas untuk Percepatan Penurunan Stunting, Monitorig Evaluasi					2.972.941.917,80	Seksi Kesga dan Gizi



KEPALA DINAS

dr. ALWAN RIMOSAN, SP.B.FINACS

NIP. 19691027 200012 1 004



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

DINAS KESEHATAN

PROVINSI PAPUA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. Alwan Rimosan, Sp.B.FINACS
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : Drs. Dominggus Mandacan, M.Si
Jabatan : Gubernur Provinsi Papua Barat

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manokwari, 11 November 2025





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
TAHUN ANGGARAN : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)	TRIWULAN	TARGET
1	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai LAKIP	Kategori	B	Triwulan I	B
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Angka Harapan Hidup	Tahun	66,57	Triwulan II	66,57
		Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Persen	91,32	Triwulan II	91,32
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	11 per 1000 Penduduk	Triwulan I	11 per 1000 Penduduk
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Puskesmas dengan Ketersediaan Obat Esensial	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Kabupaten/kota Yang Menereapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	79,92	Triwulan I	79,92
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Prevalensi Stunting	Persen	18	Triwulan I	18
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	
		Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	100	Triwulan I	100
					Triwulan II	
					Triwulan III	
					Triwulan IV	

No		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.379.335.660,89
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	53.103.555.905,44
3	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	63.886.225.679,20
4	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	276.511.437,80
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	783.288.628,25
		188.428.917.311,58





PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Sekretaris
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kabupaten	2
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi	Persen	100
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	70.379.335.661
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	28.369.778.156
Jumlah		98.749.113.817

Pihak Kedua

dr. ALWAN RIMOSAN, SP.B.FINACS
NIP. 19691027 200012 1 004

Pihak Pertama

Thomas O. Saghawari, A.MKL, SKM.,M.Kes
NIP. 19691028 199303 1 013



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Subbagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	360
2	Tersedianya Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1
3	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1
4	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1
5	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1
6	Tersedianya makanan dan minuman rapat dan tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1
7	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1
8	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1
9	Tersedianya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1
10	Tersedianya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	1
11	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan	Unit	1
12	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	8
13	Tersedianya Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	Unit	1
14	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	1000
15	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1000
16	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1
17	Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	65.999.667.000
				1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	35.000.000
		2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.000.000
				2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	72.038.450
				2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	161.982.000
				2.4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	135.000.000
				2.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	411.835.000
				2.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	54.000.000
		3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	657.000.000
				3.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.630.713.551
		4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	760.000.000
		5	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	78.165.000
				5.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.000.000
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Pengembangan Rumah Sakit	10.444.708.084
				1.2	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2.202.100.000
				1.3	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	5.471.187.507
				1.3.1	Pengadaan PC dan Printer Labkesda	281.482.000
				1.3.2	Angkutan operasional gudang obat, spesifikasi hilux 4x4	500.000.000
				1.3.3	Sanitarian kit	117.962.000
				1.3.4	Mebel labkesda	850.000.000
				1.3.5	Pengadaan Alat Kesehatan RSUD Kab. Manokwari	759.883.721
				1.3.6	Pengadaan Ambulance PKM Fafurwar, Teluk Bintuni	1.000.000.000
				1.3.7	Pengadaan Motor	43.085.011
				1.3.8	Pengadaan Ambulance Jenazah	1.523.844.775
				1.3.9	Pengadaan Alat Kesehatan	394.930.000
				1.4	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	400.000.000

	2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana		2.827.630.928
			2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)		1.396.500.000
			2.3	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan		802.950.898
				2.3.1	pelayanan imunisasi rutin di masyarakat diutamakan OAP	802.950.898
			2.4	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan		3.852.073.320
				2.4.1	Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda)	738.496.000
				2.4.2	Pelayanan kesehatan keg HKN, PI, Pesparawi	200.000.000
				2.4.3	Harmonisasi 4 draft lintas program di Dinkes (Pergub)	300.902.000
				2.4.4	transport klinik kajati	43.200.000
				2.4.5	Pelayanan klinik kesehatan Kantor Gubernur	164.800.000
				2.4.6	Integrasi Layanan Primer (ILP)	412.711.320
				2.4.7	Hibah PMI	1.000.000.000
				2.4.8	Audiensi RS.Vertikal Papua Barat	141.940.000
				2.4.9	Koordinasi, Advokasi dan Monev Sinergisme Program prioritas astacita presiden	140.000.000
				2.4.10	Pengadaan Laptop dan PC Bagi petugas penginput data e-ppgbm (data stunting) di puskesmas	600.000.000
				2.4.11	Pengadaan Laptop Bagi petugas puskesmas dalam rangka ILP	10.024.000
				2.4.12	Tim Medis Pengawalan Kunjungan Gubernur	100.000.000
			Jumlah	97.442.551.739		

Pihak Kedua



Thomas O. Saghawari, A.MKL, SKM., M.Kes
NIP. 19691028 199303 1 013

Pihak Pertama



Thomas O. Saghawari, A.MKL, SKM., M.Kes
NIP. 19691028 199303 1 013



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Subbagian Hukum, Kepegawaian dan Umum
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1

No	Program	No	Kegiatan	Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.1	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		200.000.000
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1,1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		PPTK Bidang SDK
					1.1.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	124.947.400
						Jumlah	200.000.000

Pihak Kedua


Thomas O. Saghawari, A.MKL, SKM, M.Kes
NIP. 19691028 199303 1 013

Pihak Pertama


Linda Toding, S.H
NIP. 19850207 201004 2 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Subbagian Program, Informasi dan Humas
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	RKA dan DPA Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun Berjalan	Jumlah Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1
2	Kinerja Dinas Kesehatan provinsi papua Barat per tahun anggaran	Jumlah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1
3	Terlaksananya Pengelolaan Sitem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1
4	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.1	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	35.000.000
				1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	98.934.660
2	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	659.157.612
		2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	2.1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	313.469.806
				2.1.1	Pembuatan Profil kesehatan	144.900.000
				2.1.2	Pertemuan penguatan sistem informasi logistik terintegrasi	168.569.806
Jumlah						1.106.562.078

Pihak Kedua


Thomas Q. Saghawari, A.MKL, SKM., M.Kes
NIP. 19691028 199303 1 013

Pihak Pertama


Mersi Katrina Manurung, S.KM, MIPH
NIP. 19851010 200909 2 003



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI PAPUA BARAT
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	Persen	85
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.013.176.173
	Jumlah	4.013.176.173

Pihak Kedua


dr. ALWAN RIMOSAN, SP.B.FINACS
NIP. 19691027 200012 1 004

Pihak Pertama


Rahmawati, S.Si., M.Kes., Apt.
NIP. 19800214 200801 2 013



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA

TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI PAPUA BARAT
: Sub Bagian Tata Usaha
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1 Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	106.390.000
				1.1.1 Bahan Repacking Distribusi Obat dan BMHP UPTD Farmasi Papua Barat	55.782.000
				1.1.2 Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	50.608.000
				Jumlah	106.390.000

Pihak Kedua



Rahmawati, S.Si., M.Kes., Apt.
NIP. 19800214 200801 2 013

Pihak Pertama



Anike Karolina Sanggemi, SE
NIP. 198041125 201104 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA

TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI PAPUA BARAT
: Seksi Analisis, Penerimaan, Distribusi dan Pengamanan
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Distibusi Alkes, Obat, dan Vaksin terpenuhi dan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Yang Memadai	Tersedianya Biaya Pendistribusian Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta dan Jumlah Obat, Vaksin, Makanan dan Minuman serta Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Disediakan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	1.586.786.173
				1.1.1	Distribusi Obat, BMHP, dan Vaksin dari Provinsi ke Kab/Kota (UPTD Instalasi Farmasi Provinsi)	1.586.786.173
					Jumlah	1.586.786.173

Pihak Kedua



Rahmawati, S.Si.,M.Kes., Apt.
NIP. 19800214 200801 2 013

Pihak Pertama



Luluk Irma Safitri Riani, Amd
NIP. 19771217 200801 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD

UNIT KERJA

TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat

: UPTD INSTALASI FARMASI PROVINSI PAPUA BARAT

: Seksi Penyimpanan, Pemeliharaan, dan Penyiapan

: 2025

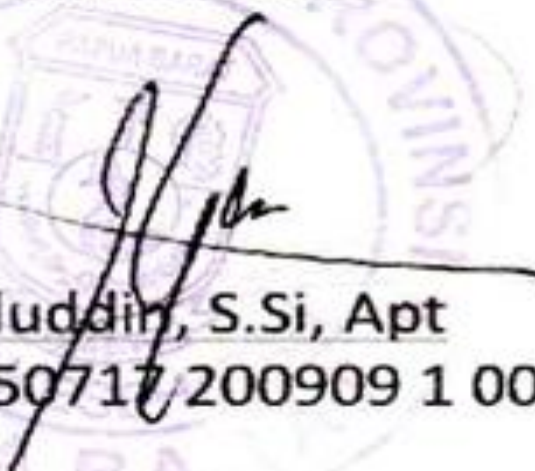
NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1 Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.320.000.000
		2	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	1,1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	168.569.806
				1.1.1 Pertemuan penguatan sistem informasi logistik terintegrasi	168.569.806
				Jumlah	2.320.000.000

Pihak Kedua


Rahmawati, S.Si.,M.Kes., Apt.
NIP. 19800214 200801 2 013

Pihak Pertama


Amiluddin, S.Si, Apt
NIP. 19750717 200909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Bidang Kesehatan Masyarakat
: 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas dan Aksebilitas Layanan Kesehatan Yang Merata	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	Kematian Bayi	8,31
		Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	Kematian Ibu	59,98
		Jumlah Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Kabupaten/Kota Sehat	Kab/Kota	2
		Persentase Kabupaten / Kota Yang Melaksanakan Kesehatan Kerja	Persen	75
		Persentase Kabupaten/kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Lanjut Usia	Persen	65
		Persentase Kabupaten/Kota Yang Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan Usia Reproduksi	Persen	60
2	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Presentase Posyandu Aktif (Posyandu Buka Layanan dan Melaporkan Kegiatan Posyandu)	Persen	90
		Kabupaten/Kota yang melaksanakan Kampanye Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)	Kabupaten	6,00
3	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gisi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat. terutama masyarakat miskin	Persentase Kabupaten/kota Yang Melaksanakan Surveilans Gizi (terkait penurunan prevalensi stunting)	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	4.505.840.325
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	783.288.628
Jumlah		5.289.128.953

Pihak Kedua


dr. ALWAN RIMOSAN, SP.B.FINACS
NIP. 19691027 200012 1 004

Pihak Pertama


dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si.
NIP. 19720501 200212 007



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Penurunan Jumlah Kematian Ibu (AKI) per tahun dan Angka Kematian anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1
3	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1
4	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan		Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	440.838.000
				2.1.1	analisa data, pertemuan evaluasi AKI AKB, koordinasi LP LS dalam mendukung penurunan stunting	440.838.000
				2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	75.328.000
				2.2.1	Supervisi Program Usia Produktif bagi Pengelola Program dan tenaga Kesehatan	75.328.000
				2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	75.328.000
				2.3.1	Pertemuan Koordinasi Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Tk. Kabupaten di Provinsi	75.328.000
				2.4	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	412.711.320
				2.4.1	Integrasi Layanan Primer (ILP)	412.711.320
				2.5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	2.972.941.918
				2.5.1	Penguatan Pelayanan Gizi Spesifik di Puskesmas untuk Percepatan Penurunan Stunting, Penyediaan Pangan Bergizi Yang	2.972.941.918
					Jumlah	3.564.435.918

Pihak Kedua

dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si.
NIP. 19720501 200212 007

Pihak Pertama

Andryelisa Parinussa, SKM
NIP. 19740609 199603 1 003



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Kesehatan Lingkungan, Kerja dan Olahraga
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1
3	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan			Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga		150.000.000
				1.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan		636.810.425
				1.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)		154.593.982
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan		490.749.000
				1.1.1	Pelatihan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Pada Situasi Bencana		490.749.000
						Jumlah	941.404.407

Pihak Kedua

dr. Fenny Mayana Paisey, M.Si.
NIP. 19720501 200212 007

Pihak Pertama

Frans Abidondifu, SKM
NIP. 19761003 199906 1 003



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

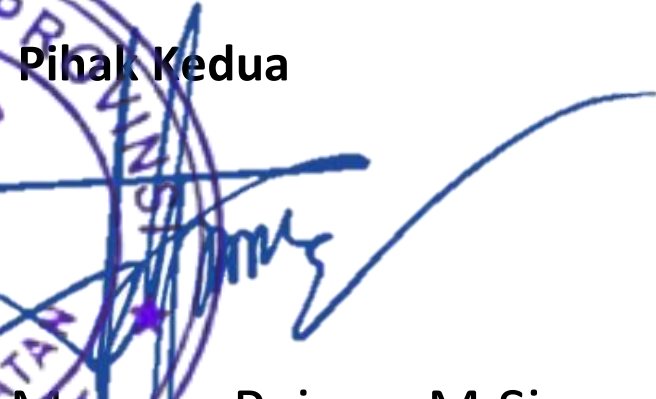
SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Dokumen	1
2	Terlaksananya Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1,1	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	293.430.556,90
					1.1.1	Peningkatan Kompetensi/Keterampilan Kader bagi Mama Kader Posyandu khusus OAP Kabupaten di Provinsi Papua Barat
		2	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi Provinsi	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	489.858.071,35
					1.1.1	Pelayanan kesehatan dan pemberdayaan kesehatan di masyarakat kampung OAP
						Jumlah

Pihak Kedua


dr. Fenny Mayana Paissey, M.Si.
NIP. 19720501 200212 007

Pihak Pertama


Jemima Jacadewa, SKM., M.Kes
NIP. 19700717 199203 2 011



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

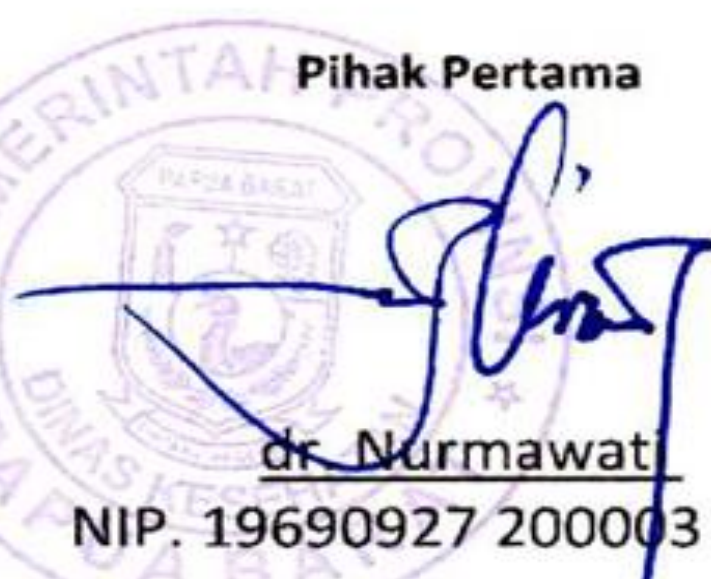
: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Bidang Pencegahan & Pengendalian Penyakit
: 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Kualitas dan Akseibilitas Layanan Kesehatan Yang Merata	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1
		Menurunnya Prevalensi HIV	Persen	2
		Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment	Persen	75
		Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Per 1000 Penduduk	7
		Persentase Pelayanan Kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB Provinsi	Persen	100
		Persentase Bayi Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar	Persen	95
		Jumlah Kabupaten Yang Menerapkan Kawasan Tanpa Rokok	Kabupaten	6
		Jumlah Kematian Jemaah Haji	orang	0
No	Program			Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			4.456.827.494
	Jumlah			4.456.827.494

Pihak Kedua


dr. ALWAN RIMOSAN, SP.B.FINACS
NIP. 19691027 200012 1 004

Pihak Pertama


dr. Nurmawati
NIP. 19690927 200003 2 008



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Menular
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1
2	Prevalensi HIV	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1
3	Cakupan Penemuan dan Pengobatan TBC (Treatment Coverage)	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1
4	Annual Paracite Incidence (API) < 1 per 1.000 Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.245.340.327	
					1.1.1	Integrasi Pelayannan/pengelolaan penyakit menular dan tidak menular di masyarakat OAP	752.493.766
					1.1.2	Alat bantu untuk Penderita Kusta	150.000.000
					1.1.3	Alat Laboratorium Lain , Untuk Pemeriksaan Malaria	90.968.011
					1.1.4	Operasional Rumah Perlindungan	251.878.550
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	279.254.147	
				2.2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	345.244.565	
				2.3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	248.001.350	
						Jumlah	

Pihak Kedua

dr. Nurmawati
NIP. 19690927 200003 2 008

Pihak Pertama

Edi Surendar, ST, S.Si
NIP. 197507051996031005



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA

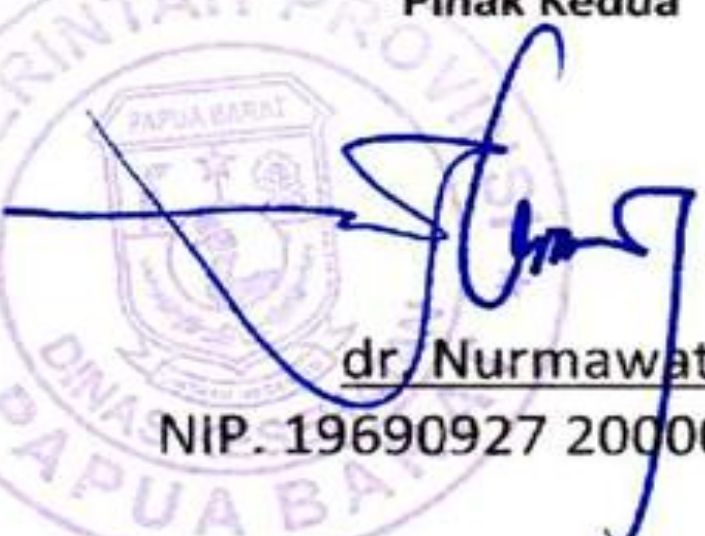
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pencegahan & Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	990.554.731
				1.1.1	pembinaan pendampingan monev	246.570.500
				1.1.2	koornisasi/advokasi/sosialisasi dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit	101.242.500
				1.1.3	Harmonisasi Perda KTR (kawasan Tanpa Rokok)	336.235.600
				1.1.4	Screening PTM	165.831.631
				1.1.5	Alat Laboratorium Lain , Untuk Pemeriksaan PTM	140.674.500
				Jumlah		990.554.731

Pihak Kedua


dr. Nurmawati
NIP. 19690927 200003 2 008

Pihak Pertama


Apriyani Taedini, SKM., M.Kes
NIP. 19680411 199003 2 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Surveilans dan Imunisasi
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1
3	Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)	
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	870.217.375	
					1.1.1	verifikasi sinyal/rumor KLB	85.132.500
					1.1.2	validasi data sasaran pencegahan dan	121.242.500
					1.1.3	Pelacakan kasus penyakit potensi KLB/PD3I di Masyarakat OAP, Surveilans anak sekolah OAP, Surveilans Berbasis Masyarakat OAP	663.842.375
				1.2	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	277.047.000	
				1.3	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	75.328.000	
				1.4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	125.840.000	
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	PPTK Bidang SDK	
					1.1.1	Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini, dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN) dan Wilayah	289.969.000
					1.1.2	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	233.649.000
				Jumlah		1.348.432.375	

Pihak Kedua

Dr. Nurmawati
NIP. 19690927 200003 2 008

Pihak Pertama

Owira Indow, SKM, M.Kes
NIP. 19730303 199403 1 009



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

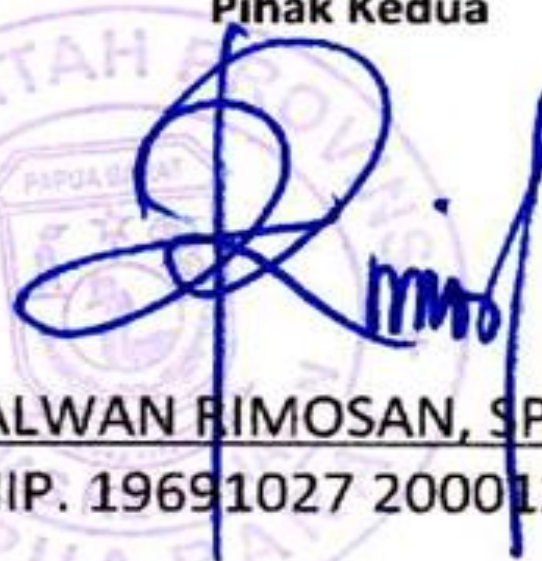
Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Bidang Pelayanan Kesehatan
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Capaian Universal Health Coverage (UHC)	Persen	100
		Persentase Puskesmas Yang Menyelenggarakan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Tradisional	Persen	60
		Persentase Alat Kesehatan Yang digunakan Sesuai Standar	Persen	46,53
		Persentase FKTP Terakreditasi	Persen	60
		Persentase Rumah Sakit Rujukan Provinsi Yang Terakreditasi	Persen	100
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	: 1000 Rasio TT : 1000 Penduduk	2.2:1000
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Persentase Status Aktif Kepesertaan JKN-KIS	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	11.757.933.757
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	56.350.400.000
Jumlah		68.108.333.757

Pihak Kedua

dr. ALWAN RIMOSAN, SP.B.FINACS
NIP. 19691027 200012 1 004

Pihak Pertama

dr. Siti Ramlah Saifoeddin, MPH
NIP. 19710117 200012 2 005



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Jumlah Pelayanan Kesehatan Di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll) yang Dilakukan Pengembangan	Layanan	3
2	Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit	1
3	Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1
4	Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1
5	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	2
6	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	2

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine, dll)	492.675.914
				1.1.1	Pelayanan Kesehatan Bergerak	492.675.914
				1.2	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	292.082.846
		2	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.1	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	208.000.000
				2.1.1	Pelayanan klinik kesehatan Kantor Gubernur	164.800.000
				2.1.2	transport klinik kajati	43.200.000
				2.2	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	232.940.741
				2.2.1	Workshop Public Safety Center (PSC) 119 Tingkat Provinsi Papua Barat	232.940.741
				3	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	3.1
		3.1.1	Peningkatan Kapasitas Penanggung Jawab Data ASPAK dan UPAK (RMC) Tingkat Provinsi Papua Barat			272.940.741
		3.2	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan			613.809.141
		3.2.1	Monev Terpadu Pelayanan Kesehatan Primer Tingkat Provinsi Papua			238.481.141
		3.2.2	Peningkatan mutu dan keselamatan pasien			75.328.000
		3.2.3	Monev Perijinan dan standarisasi Alkes	300.000.000		
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	1.1	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	50.000.000.000
				1.1.1	Program Papua Barat Sehat	50.000.000.000
				Jumlah		51.904.449.383

Pihak Kedua
dr. Siti Ramlah Saifoeddin, MPH
NIP. 19710117 2000112 2 005

Pihak Pertama
dr. Siti Ramlah Saifoeddin, MPH
NIP. 19710117 2000112 2 005



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1
2	Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1
3	Terlaksananya Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Rumah Sakit Yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	2
4	Meningkatnya Kesehatan Bagi Orang Asli Papua	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Persen	100

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan		Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1,1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	8.757.540.000
				1.1.1	Kontribusi Iuran PBI JK	8.757.540.000
				1,2	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	160.261.709
				1.2.1	Pembiayaan pendampingan rujukan ODGJ	160.261.709
		2	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2,1	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	553.770.857
				2.1.1	Pembinaan dan Pengawasan Sistem Rujukan Terintegrasi Papua Barat	153.820.510
2.1.2	Pertemuan Implementasi KRIS JKN			399.950.347		
2	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN	1,1	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	6.350.400.000
				1.1.1	PBPU Pemda (BPJS OAP)	6.350.400.000
				Jumlah		15.821.972.567

Pihak Kedua

dr. Siti Ramlah Saifoeddin, MPH
NIP. 19710117 2000112 2 005

Pihak Pertama

Lasarus Mandacan, S.Sos, M.Kes
NIP. 19831223 200412 1 012



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos: 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	381.911.808
				Jumlah	381.911.808

Pihak Kedua

dr. Siti Ramlah Saifoeddin, MPH
NIP. 19710117 2000112 2 005

Pihak Pertama

Eli Kasy, S.Sos
NIP. 19811110 200412 1 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Bidang Sumber Daya Kesehatan
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Persentase Puskesmas Tersedia Obat Esensial	Persen	85
2	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Persentase Puskesmas dengan 9 Jenis Tenaga Kesehatan Sesuai Standar	Persen	55
		Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya	Orang	35
3	Meningkatnya Akses, Kemandirian dan Mutu Kefarmasian dan Alat Kesehatan	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan Berusaha	Persen	100
		Persentase Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT) Yang Memenuhi Ketentuan Perizinan	Persen	100

No	Program	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	7.535.825.679
2	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	276.511.438
Jumlah		7.812.337.117

Pihak Kedua

dr. ALWAN RIMOSAN, SP.B.FINACS
NIP. 19691027 200012 1 004

Pihak Pertama

Yahya Salabai, SKM., M.kes
NIP. 19680708 199503 1 002



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD
UNIT KERJA
TAHUN ANGGARAN

: Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
: Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
: 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	30
2	Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1
3	Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang	23

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	2.054.075.356
				1.1.1 Pelatihan Tim Gerak Cepat (TGC) Kesiapsiagaan, Kewaspadaan Dini, dan Respon Menghadapi Penyakit Infeksi Emerging di Pintu Masuk Negara (Bandara, Pelabuhan, dan PLBDN) dan Wilayah	289.969.000
				1.1.2 Pelatihan Penggunaan Aplikasi Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) bagi Petugas Surveilans di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota	233.649.000
				1.1.3 Pelatihan Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Pada Situasi Bencana	490.749.000
				1.1.4 Pelatihan PKN, PKA, PKP dan Pembiayaan S2	914.760.956
				1.1.5 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	124.947.400
				1.2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	489.335.364
				1.2.1 Pertemuan Rencana Kebutuhan, monev data SISDMK diutamakan OAP, pengantaran dan penjemputan Nusantara Sehat ke Kabupaten, perekrutan nakes teladan	489.335.364
		2	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	2.1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	4.992.414.959
				2.1.1 PPDS afirmasi	4.992.414.959
				Jumlah	7.535.825.679

Pinak Kedua

Yanya Salabai, SKM., M.kes
NIP. 19680708 199503 1 002

Pinak Pertama

Yohanis Mansim, S.Kep
NIP. 19830205 200412 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Seksi Kefarmasian
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	1
2	Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Pengawasan Perizinan Sarana Pelayanan Kefarmasian (Apotek dan Toko Obat), Pangan Industri Rumah	Sarana	3

No	Program		Kegiatan	Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan	1,1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	213.829.189
		2	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	2,1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	62.682.249
				Jumlah	276.511.438

Pihak Kedua
Yahya Salabai, SKM., M.kes
NIP. 19680708 199503 1 002

Pihak Pertama
Ida Bagus Windusara, S.Si., Apt
NIP. 19830313200909 1 001



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
DINAS KESEHATAN

Alamat: Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA

SKPD : Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat
UNIT KERJA : Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
TAHUN ANGGARAN : 2025

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET TAHUNAN (2025)
1	2	3	4	5
1	Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	2

No	Program		Kegiatan	Sub Kegiatan			Anggaran (Rp)
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	1.1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan		300.000.000
					1.1.1	Monev Perijinan dan standarisasi Alkes	300.000.000
				Jumlah			300.000.000

Pihak Kedua


Yanha Salabai, SKM., M.kes
NIP. 19680708 199503 1 002

Pihak Pertama


Salome Saiba, SKM
NIP. 19750402 200412 2 001

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah provinsi yang mengacu pada sasaran RKPD provinsi:

No	Sasaran	Kode	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Rencstra Perangkat Daerah Provinsi pada Tahun 2020 (akhir periode Rencstra Perangkat Daerah Provinsi) (Akhir Tahun RPJMD)	Realisasi Capaian Kinerja Rencstra Perangkat Daerah Provinsi sampai	Target kinerja dan anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi Tahun Berjalan (Tahun 2020) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada										Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Provinsi yang dievaluasi				Realisasi Kinerja dan Anggaran Rencstra Perangkat K	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi K	Unit Pengang																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000

			1	02	02	102	0011	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	5	Dokumen	18.571.725.166	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	400.000.000	3.252.508.000,00	3.852.073.320,40	1	Dokumen	1	Dokumen	72.000.000	1	Dokumen	157.042.500	1	Dokumen	3.492.920.683	1	Dokumen	100%	3.721.963.183	96,62%	1	3.721.963.183	20,00%	20,04%	Dinas Kesehatan	
			1	02	02	102	0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	4	Dokumen	646.518.750	0	Dokumen	-	1	Dokumen	0	Dokumen	200.000.000	-	-	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	102	0021	Investigasi Lapangan Kejadian Isutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lapangan Kejadian Isutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	4	Dokumen	614.093.625	0	Dokumen	-	1	Dokumen	0	Dokumen	100.000.000	-	75.328.000,00	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	74.982.050	Dokumen	#DIV/0!	74.982.050	99,54%	0	74.982.050	0,00%	12,21%	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	102	0022	Penyediaan dan Pengembangan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	5	Unit	1.287.144.638	0	Unit	-	1	Unit	1	Unit	75.328.000	232.940.741,00	232.940.741,00	1	Unit	1	Unit	1	Unit	200.212.427	1	Unit	100%	200.212.427	85,56%	1	200.212.427	20,00%	15,55%	Dinas Kesehatan					
			1	02	02	102	0024	Pengembangan Rujukan dan Rujuk Balik	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	5	Dokumen	897.229.079	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	400.000.000	162.843.000,00	160.261.709,25	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	41.760.000	1	Dokumen	100%	41.760.000	26,06%	1	41.760.000	20,00%	4,85%	Dinas Kesehatan			
			1	02	02	102	0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan Nasional yang Didakui	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan Nasional yang Didakui	5	Paket	1.530.859.561	0	Paket	-	1	Paket	1	Paket	250.000.000	277.047.000,00	277.047.000,00	1	Paket	1	Paket	24.905.000	1	Paket	25.500.000	1	Paket	100%	128.888.401	46,52%	1	128.888.401	20,00%	8,42%	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	102	0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	5	Dokumen	3.173.519.648	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	200.000.000	816.241.084,00	802.950.898,00	1	Dokumen	1	Dokumen	259.580.000	1	Dokumen	23.994.410	1	Dokumen	516.007.000	1	Dokumen	100%	799.581.410	99,58%	1	799.581.410	20,00%	25,20%	Dinas Kesehatan	
			1	02	02	102	0030	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Diurung dan Ditrivevns Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	178072	Kelarga	1.077.531.250	0	Kelarga	-	44518	Kelarga	0	Kelarga	100.000.000	-	-	0	Kelarga	0	Kelarga	0	Kelarga	0	Kelarga	0	Kelarga	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	103		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						-					200.000.000	313.469.806	313.469.806		-																	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	103	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	5	Dokumen	2.253.026.056	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	200.000.000	313.469.806,00	313.469.806,00	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	290.928.856	1	Dokumen	100%	290.928.856	92,81%	1	290.928.856	20,00%	12,91%	Dinas Kesehatan					
			1	02	02	104		Penorbanan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						-					875.000.000	1.440.520.739	1.440.520.739		-																	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	104	0001	Pengembangan dan Pengawasan serta Tidak Lulus Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikembangkan, Dawasi dan Dikembangkan, Dikembangkan Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	4	Unit	646.518.750	0	Unit	-	1	Unit	0	Unit	75.000.000	-	-	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	104	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan	45	Unit	4.075.411.598	0	Unit	-	2	Unit	2	Unit	350.000.000	826.711.598,00	826.711.598,00	2	Unit	2	Unit	2	Unit	328.967.642	2	Unit	100%	677.513.955	81,95%	2	677.513.955	4,44%	16,62%	Dinas Kesehatan					
			1	02	02	104	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan	54	Unit	3.630.896.641	0	Unit	-	2	Unit	2	Unit	450.000.000	613.809.141,00	613.809.141,00	2	Unit	2	Unit	148.169.433	2	Unit	2	Unit	100%	459.423.406	74,85%	2	459.423.406	3,70%	12,65%	Dinas Kesehatan					
			1	02	02	402		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UPP Rujukan, UJRM dan UJRM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						-					1.341.896.548	888.803.615	872.509.061		-																	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	402	0036	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	2.003.304.147	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	391.445.280	284.378.000,00	279.254.147,20	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	244.042.502	1	Dokumen	100%	244.042.502	87,39%	1	244.042.502	20,00%	12,18%	Dinas Kesehatan					
			1	02	02	402	0037	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	2.069.294.565	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	400.445.280	351.967.115,00	345.244.564,60	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	320.613.366	1	Dokumen	100%	320.613.366	92,87%	1	320.613.366	20,00%	15,49%	Dinas Kesehatan					
			1	02	02	402	0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	2.034.760.705	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	350.000.000	252.458.500,00	248.001.349,60	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	196.364.142	1	Dokumen	100%	196.364.142	79,18%	1	196.364.142	20,00%	9,85%	Dinas Kesehatan					
			1	02	02	402	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	4	Dokumen	1.293.037.500	0	Dokumen	-	1	Dokumen	0	Dokumen	200.000.000	-	-	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan				
			1	02	02	402	0046	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Kusta yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	1.724.050.000		Dokumen			Dokumen		Dokumen					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dinas Kesehatan				
			1	02	02	402	0045	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Frambusia yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5	Dokumen	1.077.531.250		Dokumen			Dokumen		Dokumen					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dinas Kesehatan				
			1	02	02	402	0050	Pengelolaan Penanggulangan Penyakit Filariasis	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit Filariasis Sesuai Standar	5	Dokumen	1.077.531.250		Dokumen			Dokumen		Dokumen					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dinas Kesehatan				
			1	02	02	402	0056	Pengelolaan Penanggulangan penyakit tidak menular	Jumlah Dokumen Hasil Penanggulangan Penyakit tidak menular Sesuai Standar	5	Dokumen	2.370.568.750		Dokumen			Dokumen		Dokumen					Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen		Dokumen						Dinas Kesehatan				
			1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						-					12.183.436.195	13.904.476.386	63.886.228.679		-																	Dinas Kesehatan				
								Persentase Puskesmas dengan SDMK Sesuai Standar		79,01	Persen	86.791.514.069																																
								Jumlah SDM Kesehatan Orang Asli Papua yang ditingkatkan Kompetensi dan Kualifikasinya		40	Orang	23.830.839.999																																
								Persentase RS pemerintah dengan dokter spesialis sesuai standar		71,42	Persen																																	
			1	02	03	101		Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UJRM dan UJRM Provinsi						-					963.162.200	-	-		-																		Dinas Kesehatan			
			1	02	03	101	0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyakes)	25	Orang	3.424.703.767	0	Orang	-	10	Orang	0	Orang	863.162.200	-	-	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan				
			1	02	03	101	0002	Distribusi dan Pemertaban Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Tersedibaf	25	Orang	3.424.703.766	0	Orang	-	10	Orang	0	Orang	100.000.000	-	-	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	0	Orang	#DIV/0!	-	#DIV/0!	0	-	0,00%	0,00%	Dinas Kesehatan				
			1	02	03	102		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						-					850.000.000	2.554.875.356	2.543.410.720		-																	Dinas Kesehatan				
			1	02	03	102	0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	57	Orang	8.864.075.356	0	Orang	-	10	Orang	30	Orang	500.000.000	2.054.075.356,00	2.054.075.356,00	30	Orang	30	Orang	73.931.925	30	Orang	329.100.000	30	Orang	100%	1.621.417.043	30	Orang	100%	1.621.448.968	78,94%	30	1.621.448.968	52,63%	18,31%	Dinas Kesehatan
			1	02	03	102	0003	Pembinaan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Penguasaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	5	Dokumen	2.278.891.614	0	Dokumen	-	1	Dokumen	1	Dokumen	350.000.000	500.000.000,00	489.335.364,40	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	53.987.950	1	Dokumen	100%	367.739.250	73,92%	1	367.727.200	20,00%	15,87%	Dinas Kesehatan					
			1	02	03	402		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						-					5.834.273.995	5.800.000.000	4.992.414.959		-																	Dinas Kesehatan				
			1	02	03	402	0005	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	135	Orang	23.830.839.999	0	Orang	-	25	Orang	23	Orang	5.834.273.995	5.000.000.000,00	4.992.414.958,80	23	Orang	23	Orang	1.955.050.000	23	Orang	596.941.200	23	Orang	100%	3.417.331.562	68,45%	23	3.417.331.562	17,04%	14,34%	Dinas Kesehatan				
			1	02	03	403		Penyenggaraan Jaminan Kesehatan Papua terintegrasi dengan Program JKN						-					4.536.000.000	6.350.400.000	56.358.600.000		-																	Dinas Kesehatan				
			1	02	03	403	0001	Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Jumlah Penerimaan JKN Provinsi PapuaMeningkat	77359	Orang	34.587.968.690	0	Orang	-	14000	Orang	17315	Orang	4.536.000.000	6.350.400.000,00	56.350.400.000,00	17315	Orang	17315	Orang	1.394.857.800	17315	Orang	1.444.149.000	17315	Orang	5.161.063.400	17315	Orang	100%	8.000.070.200	14,20%	17315	8.000.070.200	22,38%	23,13%	Dinas Kesehatan	
			1	02	03	404		Penyenggaraan Jaminan Kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja khususnya di daerah terpencil						-					7.940.630.917																					Dinas Kesehatan				
			1	02	03	404	0001	Pelaksanaan jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	Jumlah tenaga kesehatan yang mendapat jaminan kesejahteraan bagi tenaga kesehatan Papua termasuk program jaminan sosial tenaga kerja khususnya di daerah terpencil	35	Orang	7.940.630.917		Orang			Orang		Orang					Orang		Orang		Orang		Orang		Orang								Dinas Kesehatan				
			1	02	03	405		Penyenggaraan J																																				

Manokwari, 5 Januari 2026
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat



dr. Alwan Rimosan, Sp.B.Finacs
NIP. 19691027 200012 1 004



PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi, Arfai, Manokwari. Kode Pos : 98315

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR : 000.1/2660.a/DK-PB/X/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 (ayat 3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan uruf b telah disusun sebagai satu dokumen perencanaan indikatif yang memuat program – program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat;
- d. bahwa berdasarkan peetimbangan sebagaimana dimaskusud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tentang penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan BAB I PENDAHULUAN | I-3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan pelaksanaan Kebijakan Otonomi Provinsi Papua;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan Pengelolaan Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M/PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Papua Barat 2006-2025;
15. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan di Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal yang telah ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki Kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Manokwari
Pada Tanggal, 20 Oktober 2023

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat


Dr. PENNY MAYANA PAISEY, M.Si
NIP. 19720501 200212 2 007

LAMPIRAN : I
 NOMOR : 000.1/2660.a/DK-PB/X/2023
 TANGGAL : 20 Oktober 2023
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS
 KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENSTRA DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT 2023-2026

No	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode 2022	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Akhir Kinerja
				2023	2024	2025	2026	
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	65.78	66.04	66.31	66.57	66.84	66.84
2	Persentase Kecamatan Memiliki Minimal 1 Puskesmas	Persen	75.00%	75.50%	83.11%	91.32%	100%	100%
3	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	Per 1000 Penduduk	10.45 per 1000 penduduk	10.50 per 1000 penduduk	10.55 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk	11 per 1000 penduduk
4	Persentase Puskesmas Dengan Ketersediaan Obat Esensial Sebesar 100%	Persen	78.33%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Persentase Kabupaten / Kota Yang Menerapkan Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat	Persen	42.85%	46.15%	61.54%	79.92%	100%	100%
6	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	Persen	30%	26%	22%	18%	14%	14%
7	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	10.05%	8.5%	7.5%	7.2%	6.9%	6.9%

Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Papua Barat


Dr. FENNY MAYANA PAISEY, M.Si
 NIP. 89720501 200212 2 007

CASCADING DAN KESELARASAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Akip	B	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 70.379.335.661	Nilai Lakip	B		
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 133.934.660				
					1,1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 98.934.660	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1	Sub Bagian Program Informasi dan Humas
					1,2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 35.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1	Sub Bagian Program Informasi dan Humas
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 66.034.667.000				
					1,1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 65.999.667.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	105	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 35.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp 200.000.000				
					1,2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 200.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1	Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 854.855.450				
					1,1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian
					1,2 Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 72.038.450	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian
					1,3 penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Rp 161.982.000	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian
					1,4 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 54.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian
					1,5 Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 135.000.000	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,6 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 411.835.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	Rp 760.000.000				
					1,1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 760.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	3	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Rp 2.287.713.551				
					1,1 Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 657.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2 Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Rp 1.630.713.551	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Rp 108.165.000				
2	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Secara Merata	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	%	100	1,1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 78.165.000	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	59	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Rp 30.000.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	191	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 45.397.092.459	Usia Harapan Hidup	100%		
					Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 20.344.743.017				
					1,1 Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 400.000.000	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	Unit	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,2 Pengembangan Rumah Sakit	Rp 10.444.708.084	Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang	Unit	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,3 Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis	Rp 492.675.914	Terlaksananya Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine , dll)	Layanan	5	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,4 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Rp 2.202.100.000	Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Lainnya	Unit	1	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,5 Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp 292.082.846	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses	Unit	1	Seksi Pelayanan Rujukan

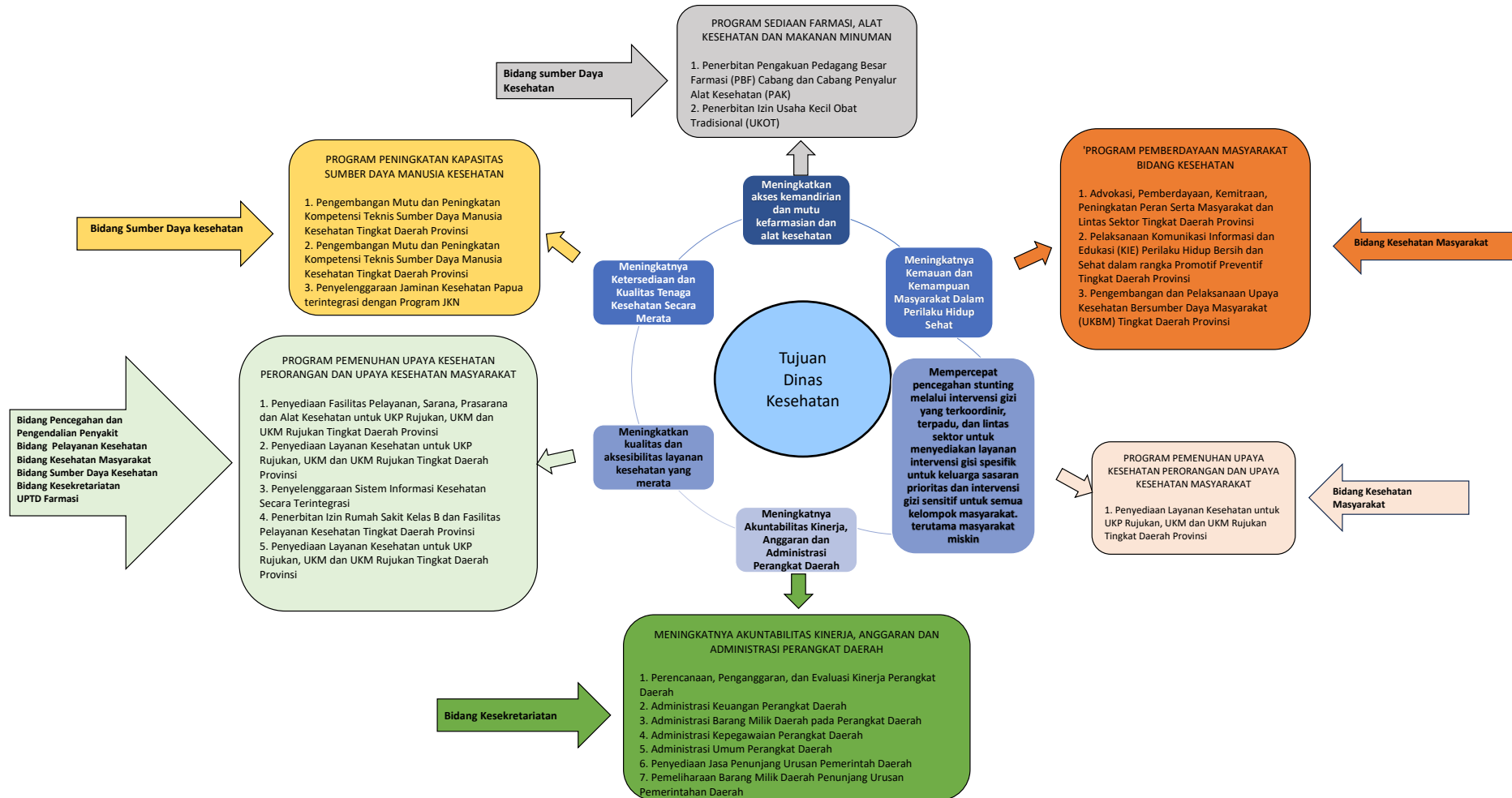
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	
					1,6	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Rp 2.500.000.000	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	Unit	20	Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1,7	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Rp 2.320.000.000	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Paket	1	UPTD Farmasi
					1,8	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Rp 1.693.176.173	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	Dokumen	1	UPTD Farmasi
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi		Rp 22.175.887.304				
					1,1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/ atau berpotensi bencana	Rp 2.827.630.928	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Orang	1100	Sub Bagian Program Informasi dan Humas
					1,2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Rp 1.396.500.000	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	Orang	1100	Sub Bagian Program Informasi dan Humas
					1,3	pengelolaan Pelayanan kesehatan Ibu dan anak	Rp 440.838.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Dokumen	1	Seksi Kesga dan Gizi
					1,4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1	Seksi Kesga dan Gizi
					1,5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1	Seksi Kesga dan Gizi
					1,6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
					1,7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 636.810.425	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1	Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga
					1,9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp 381.911.808	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional
					1,10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 223.589.505	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	1	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
					1,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji Rp 125.840.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1	Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
					1,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) Rp 154.593.982	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1	Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
					1,13	pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat Rp 8.757.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
					1,14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan Rp 870.217.375	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1	Seksi Surveilans dan Imunisasi
					1,16	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota Rp 659.157.612	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Sub Bagian Program Informasi dan Humas
					1,17	Pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan Rp 3.852.073.320	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	Sub Bagian Program Informasi dan Humas, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,18	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	1	Seksi Surveilans dan Imunisasi
					1,19	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) Rp 232.940.741	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,20	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik Rp 160.261.709	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
					1,21	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional Rp 277.047.000	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1	Seksi Surveilans dan Imunisasi
					1,22	Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan Rp 802.950.898	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1	Seksi Surveilans dan Imunisasi
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi Rp 563.441.337					
					1,1	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Rp 563.441.337	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1	Sub Bagian Program Informasi dan Humas

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	PENANGGUNG JAWAB	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	Rp 1.440.520.739					
					1,1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Rp 826.711.598	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	7	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
					1,2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 613.809.141	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	2	Seksi Pelayanan Kesehatan Primer	
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 872.500.061					
					1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Rp 279.254.147	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,	
					1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Rp 345.244.565	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,	
					1,3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Rp 248.001.350	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1	Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,	
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	%	100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 63.886.225.679		100%			
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2.543.410.720					
					1,1 peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	Rp 2.054.075.356	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	10		Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
					1,2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 489.335.364	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1		Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 4.992.414.959					
					1,1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Rp 4.992.414.959	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang	25		Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
					Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua	Rp 56.350.400.000				
					1,1 Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Rp 56.350.400.000	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang	14000	Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 569.941.995	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100%		
					Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 213.829.189				
					1,1 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang PAK	Rp 213.829.189	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	Sarana	3	Seksi Kefarmasian
					Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 62.682.249				
					1,1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 62.682.249	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	1	Seksi Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 3.756.230.546	Persentase Balita Gizi Buruk	100%		
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 293.430.557				
					1,1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Rp 293.430.557	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1	Seksi Promosi Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp 489.858.071				
					1,1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 489.858.071	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1	Seksi Promosi Kesehatan
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 2.972.941.918				
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	Rp 2.972.941.918				
					1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2.972.941.918	meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	Dokumen	1	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

**CROSS CUTTING
DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT
TAHUN 2025**



RENCANA AKSI

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	TARGET				JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN												PENANGGUNG JAWAB				
														TW 1			TW 2			TW 3			TW 4							
										TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18															
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja, Anggaran dan Administrasi Perangkat Daerah	Nilai Akip	B	B	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp 70.379.335.661	Nilai Laki	B																						
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 133.934.660																								
					1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 98.934.660	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	1																			Sub Bagian Program Informasi dan Humas	
					1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp 35.000.000	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Laporan	1																			Sub Bagian Program Informasi dan Humas	
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					Rp 66.034.667.000																				
					1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 65.999.667.000	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	105																				Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset
					1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp 35.000.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dokumen	1																			Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	
					Administrasi Kepegawalan Perangkat Daerah					Rp 200.000.000																				
					1.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp 200.000.000	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	1																			Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian	
					Administrasi Umum Perangkat Daerah					Rp 854.855.450																				
					1.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Rp 20.000.000	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1																			Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian	
					1.2	Penyediaan bahan logistik kantor	Rp 72.038.450	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1																			Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian	
					1.3	penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan	Rp 161.982.000	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2																			Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian	
					1.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp 54.000.000	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1																			Sub Bagian Hukum Umum dan Kepegawaian	
					1.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp 135.000.000	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1																			Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	
					1.6	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Rp 411.835.000	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1																			Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang					Rp 760.000.000																				
					1.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp 760.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Unit	3																			Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan					Rp 2.287.713.551																				
					1.1	Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 657.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1																			Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	
					1.2	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Rp 1.630.713.551	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1																			Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset	

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	TARGET				JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN												PENANGGUNG JAWAB					
														TW 1				TW 2				TW 3					TW 4				
										TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18																
					1,4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Dokumen	1																	Seksi Kesga dan Gizi				
					1,5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Dokumen	1																			Seksi Kesga dan Gizi		
					1,6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp 150.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dokumen	1																			Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga		
					1,7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 636.810.425	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dokumen	1																			Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga		
					1,9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Rp 381.911.808	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya	Dokumen	1																			Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional		
					1,10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Rp 223.589.505	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan tidak menular	Dokumen	1																				Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	
					1,11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Rp 125.840.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Dokumen	1																				Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	
					1,12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 154.593.982	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dokumen	1																				Seksi Pencegahan Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	
					1,13	pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Rp 8.757.540.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dokumen	1																					Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
					1,14	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp 870.217.375	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dokumen	1																					Seksi Surveilans dan Imunisasi
					1,16	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Rp 659.157.612	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	1																					Sub Bagian Program Informasi dan Humas
					1,17	Pembinaan Pelaksanaan Upaya pelayanan Kesehatan	Rp 3.852.073.320	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1																					Sub Bagian Program Informasi dan Humas, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,18	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Rp 75.328.000	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Dokumen	1																					Seksi Surveilans dan Imunisasi
					1,19	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Rp 232.940.741	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Unit	1																					Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,20	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	Rp 160.261.709	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen	1																					Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan
1,21	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Rp 277.047.000	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	Paket	1																					Seksi Surveilans dan Imunisasi					

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	TARGET				JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN												PENANGGUNG JAWAB				
														TW 1		TW 2		TW 3		TW 4										
										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12									
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	18				
					1,22 Upaya Pengurangan Resiko Krisis Kesehatan	Rp 802.950.898	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Dokumen	1																		Seksi Surveilans dan Imunisasi			
					Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Rp 563.441.337																								
					1,1 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 563.441.337	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dokumen	1																					Sub Bagian Program Informasi dan Humas
					Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat	Rp 1.440.520.739																								
					1,1 Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit	Rp 826.711.598	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	Unit	7																					Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					1,2 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Rp 613.809.141	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	Unit	2																					Seksi Pelayanan Kesehatan Primer
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 872.500.061																								
					1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS	Rp 279.254.147	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit HIV/AIDS yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1																					Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
					1,2 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB	Rp 345.244.565	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit TB yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1																					Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
					1,3 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria	Rp 248.001.350	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Malaria yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	Dokumen	1																					Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit,
3	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Tenaga Kesehatan Secara Merata	Rasio Tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	%	100	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 63.886.225.679			100%																					
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 2.543.410.720																								
					1,1 peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia Kesehatan	Rp 2.054.075.356	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	Orang	10																				Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					1,2 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 489.335.364	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dokumen	1																				Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi	Rp 4.992.414.959																								
					1,1 Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan bagi Orang Asli Papua	Rp 4.992.414.959	Jumlah Sumber Daya Manusia KesehatanKompetensi dan Kualifikasi Meningkat bagi Orang Asli Papua	Orang	25																				Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan	
					Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Papua	Rp 56.350.400.000																								
					1,1 Pengelolaan Manfaat Jaminan Kesehatan Papua yang terintegrasi dengan Program JKN	Rp 56.350.400.000	Jumlah Kepesertaan JKN Provinsi Papua Meningkat	Orang	14000																					Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET TAHUN 2025	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)	OUTPUT KEGIATAN	SATUAN	Target Tahunan	TARGET				JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN												PENANGGUNG JAWAB
														TW 1				TW 2				TW 3				
										TW 1	TW 2	TW 3	TW 4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18											
4	Meningkatkan akses kemandirian dan mutu kefarmasian dan alat kesehatan	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	%	100	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp 569.941.995	Persentase Pedagang Besar Farmasi (PBF) cabang yang mampu memelihara persyaratan perizinan	100%																		
					Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)	Rp 213.829.189																				
					1,1 Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang PAK	Rp 213.829.189	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Perizinan	Sarana	3																	Seksi Kefarmasian
					Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 62.682.249																				
					1,1 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindakan Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Rp 62.682.249	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjuti Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Sarana	1																	Seksi Kefarmasian, Seksi Alat Kesehatan dan PKRT
5	Meningkatnya Kemauan dan Kemampuan Masyarakat Dalam Perilaku Hidup Sehat	Persentase Balita Gizi Buruk	%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 3.756.230.546	Persentase Balita Gizi Buruk	100%																		
					Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Rp 293.430.557																				
					1,1 Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan Pemberdayaan, Penggalangan kemitraan, peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat	Rp 293.430.557	Meningkatnya penyehatan dan pengawasan kualitas pemberdayaan masyarakat	Dokumen	1																	Seksi Promosi Kesehatan
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi	Rp 489.858.071																				
					1,1 Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Rp 489.858.071	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Dokumen	1																	Seksi Promosi Kesehatan
6	Mempercepat pencegahan stunting melalui intervensi gizi yang terkoordinir, terpadu, dan lintas sektor untuk menyediakan layanan intervensi gizi spesifik untuk keluarga sasaran prioritas dan intervensi gizi sensitif untuk semua kelompok masyarakat.	Persentase Balita Gizi Buruk	%	100	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp 2.972.941.918																				
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP	Rp 2.972.941.918																				
					1,1 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 2.972.941.918	meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan	Dokumen	1																	Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

DINAS KESEHATAN PROVINSI PAPUA BARAT

PERIODE TAHUN 2017 - 2025

NO	TAHUN PEROLEHAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	PRESTASI YANG DICAPAI	NOMOR KEPUTUSAN	WAKTU PENETAPAN	DITETAPKAN OLEH	JABATAN	BENTUK PENGHARGAAN	GAMBAR
1	2017	Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja	Pencapaian dalam Kategori Jumlah Pemeriksaan IVA Test Tertinggi pada Wilayah Indonesia Timur		Jakarta, 25 April 2017	Hj. Iriana Joko Widodo dan Hj. Mufidah Jusuf Kalla	Pembina Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja	Sertifikat	
2	2018	Museum Rekor - Dunia Indonesia	Rekor Penyelenggara Pemantauan Penggunaan Kelambu Anti Nyamuk secara Serentak dengan Jumlah Terbanyak	No.8435/R.MURI/IV/2018	Jakarta, 29 April 2018	Jaya Suprana	Ketua Umum Museum Rekor - Dunia Indonesia (MURI)	Piagam Penghargaan	
3	2018	Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat	Partisipasi Mendukung Pelaksanaan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)		Manokwari, 12 Juli 2018	DRS. Untung Subagyo	Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat	Piagam Penghargaan	
4	2018	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari	Kerjasama Dalam Melaksanakan Operasi SAR di Wilayah Provinsi Papua Barat		Manokwari, 28 Februari 2019	George Leo Mercy Randang, S.IP	Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Manokwari	Piagam Penghargaan	
5	2018	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Provinsi Dengan Serapan Dekon Kegiatan Satker P2PTVZ Tertinggi Pada Tahun 2018		Jakarta, 25 Februari 2019	dr. Anung Sugihantono, M.Kes	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
6	2018	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Satker Terbaik ke-1 (339033), Tingkat Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat dalam Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018 " Kategori Satker DK/TP "			Arif Wibawa	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	Piagam Penghargaan	
7	2018	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Provinsi Dengan Pelaporan POPM Filariasis di Seluruh Kab/Kotanya Secara Cepat, Lengkap dengan Cakupan > 65%		Jakarta, 25 Februari 2019	dr. Anung Sugihantono, M.Kes	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
8	2018	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2018		Jakarta, 23 Mei 2018	Joko Widodo	Presiden Republik Indonesia	Piala Penghargaan	
9	2018	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Penghargaan atas Keberhasilan Mencapai ≥ 95% Cakupan Kampanye Imunisasi Measles Rubella (MR) Fase II Tahun 2018		Oktober 2018	Prof. Dr. dr. Nila Djuwita Faried Anfasa Moeloek, Sp.M(K).	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
10	2019	Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Pemenang Lomba Dalam Rangka Hari Kesehatan Nasional Tahun 2019 sebagai Pemenang ke-2, e-Aspirasi Tahun 2019, Kategori Pengelola Website Tingkat Dinas Kesehatan Provinsi Regional Timur	Kep. Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/7 11/2019	Jakarta, 6 November 2018	Terawan Agus Putranto	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
11	2019	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Peserta POSTER Terbaik (Harapan 1) pada Pertemuan Koordinasi dan Evaluasi Program Surveilans dan Karantina Kesehatan Yang di Selenggarakan pada tanggal 18-21 September 2019		Bekasi, 20 September 2019	dr. Anung Sugihantono, M.Kes	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
12	2019	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Berhasil dalam Sub PIN (Pekan Imunisasi Nasional) Polio Tahun 2019, Putaran 1 dan 2 dengan Cakupan > 95%			dr. Anung Sugihantono, M.Kes	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	

NO	TAHUN PEROLEHAN	LEMBAGA PENYELENGGARA	PRESTASI YANG DICAPAI	NOMOR KEPUTUSAN	WAKTU PENETAPAN	DITETAPKAN OLEH	JABATAN	BENTUK PENGHARGAAN	GAMBAR
13	2020	Direktorat Jenderal Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Piagam Penghargaan Atas "Komitmen Uniserval Health Coverage (UHC) Dengan Capaian 98% Tahun 2020"		November 2021	David Bangun, M. Eng, IPU ASEAN.	Direktur Kepesertaan dan Pelayanan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Piagam Penghargaan	
14	2021	Direktorat Jenderal Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Provinsi Dengan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Terbaik		Jakarta, 17 November 2021	dr. Imran Agus Nurali, Sp.KO.	Direktur Jenderal Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI	Piagam Penghargaan	
15	2021	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Kementerian Keuangan Republik Indonesia	Satker Peringkat Terbaik Pertama (339033), Satker yang Memiliki Wewenang DK/TP dengan Nilai IKPA Terbaik sebesar 90,53 Periode Semester I Tahun Anggaran 2021 Lingkup Kanwil Ditjen Perben Prov Pabar	KEP- 060/WPB.33/2021	Manokwari, 25 Agustus 2021	Moch. Ali Hanafiah	Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat	Piagam Penghargaan	
16	2022	Direktorat Jenderal Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Piagam Penghargaan Atas "Komitmen Uniserval Health Coverage (UHC) Dengan Capaian 99,07% Tahun 2022"		Desember 2022	dr. Lily Kresnowati, M.Kes.	Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	Piagam Penghargaan	
17	2022	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Capaian Dinas Kesehatan Provinsi Dalam Eliminasi Malaria Pertama Di Regional Papua - Papua Barat		DKI Jakarta, 31 Januari 2023	Dr. Dr. Maxi Rein Rondonuwu, DHSM, MARS	Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
18	2023	Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2023		Jakarta 14 Maret 2023	K.H. Ma'ruf Amin	Wakil Presiden Republik Indonesia	Piala Penghargaan	
19	2024	Kementerian kesehatan Republik Indonesia	Sertifikat eliminasi Malaria Pegunungan Arfak		10-06-24	Budi G sadikin	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
20	2024	Kementerian kesehatan Republik Indonesia	Juara 1 kejuaraan mikroskopis malaria tingkat nasional	PM.01.01/C/1867/2024	10 Juni 2024	Budi G. Sadikin	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam dan Piala Penghargaan	
21	2024	Kementerian kesehatan Republik Indonesia	Poster terbaik dengan tema peran lintas sektor dalam penanggulangan TBC di Tempat khusus dalam pertemuan movev TBC nasional 2024		9 Juni 2024	dr. Yudhi Pramono, Mars	PLT Direktur Jendral Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Piagam Penghargaan	
22	2024	Kementerian kesehatan Republik Indonesia	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards dengan Cakupan UHC Sebesar 100 %		8 Agustus 2024	Budi G. Sadikin	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
23	2024	Kementerian kesehatan Republik Indonesia	Pembina Terbaik Tingkat Provinsi Program Keamanan Pangan Olahan Siap Saji Tahun 2024	Kep. Menkes RI Nomor : HK.01.07/Menkes/1885/2024	Jakarta, 6 Desember 2024	Budi G. Sadikin	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	
24	2025	Kementerian kesehatan Republik Indonesia	Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Awards dengan Cakupan UHC Sebesar 100 %		Jakarta, 27 Januari 2026	Budi G. Sadikin	Menteri Kesehatan Republik Indonesia	Piagam Penghargaan	

Penyelenggara pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian, dan bersih dalam menyediakan pelayanan kepada warga masyarakat dan melindungi dari berbagai tindakan sewenang-wenang terhadap diri, hak maupun harta benda masyarakat.